

**EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA BADAN USAHA
MILIK DESA BUNTU TERPEDO KECAMATAN
SABBANG KABUPATEN LUWU UTARA**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi (SE) pada Program Studi Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Diajukan Oleh

Riki Rinaldi

18 0402 0165

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

2022

**EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA BADAN USAHA
MILIK DESA BUNTU TERPEDO KECAMATAN
SABBANG KABUPATEN LUWU UTARA**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi (SE) pada Program Studi Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Diajukan Oleh

Riki Rinaldi

18 0402 0165

Pembimbing :

Akbar Sabani S. EI., M.E

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

2022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang Bertanda Tangan Dibawah ini

Nama : Riki Rinaldi

Nim : 18 0402 0165

Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

Program Studi : Perbankan Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya adalah :

1. Skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiat atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini karya saya sendiri, selain kutipan yang ditujukan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya. Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya, bila mana dikemudian hari ternyata pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Palopo, 25 Oktober 2022


Saya membuat pernyataan
Riki Rinaldi

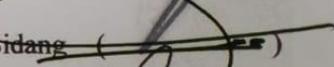
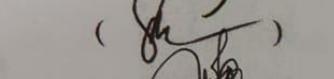
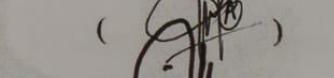
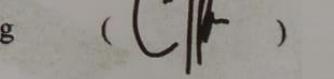
Nim. 18 0402 0165

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Analisis Pengelolaan Dana Badan Usaha Milik Desa Buntu Terpedo Kec. Sabbang Kab. Luwu Utara yang ditulis oleh Riki Rinaldi, Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 18 0402 0165 mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo yang dimunaqasyahkan pada hari Rabu, tanggal 30 November 2022 Miladiyah bertepatan dengan 6 Rabiul Awal 1444 Hijriyah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Palopo, 27 Desember 2022

TIM PENGUJI

- | | | |
|--|-------------------|--|
| 1. Dr. Takdir, S.H., M.H. | Ketua Sidang | ( |
| 2. Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.EI., M.A. | Sekretaris Sidang | ( |
| 3. Hendra Safri, S.E., M.M. | Penguji I | ( |
| 4. Hamida, S.E.Sy., M.E.Sy. | Penguji II | ( |
| 5. Mujahidin, Lc., M.EI. | Pembimbing | ( |

Mengetahui,



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang Bertanda Tangan Dibawah ini

Nama : Riki Rinaldi

Nim : 18 0402 0165

Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

Program Studi : Perbankan Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya adalah :

1. Skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiat atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini karya saya sendiri, selain kutipan yang ditujukan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya. Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya, bila mana dikemudian hari ternyata pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Palopo, 25 Oktober 2022

Yang membuat pernyataan

Riki Rinaldi

Nim. 18 0402 0165

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى أَهْلِهِ وَ أَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

(اما بعد)

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga skripsi dengan judul **“Efektivitas Pengelolaan dana Badan Usaha Milik Desa Buntu Terpedo Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu utara”**, dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan harapan.

Shalawat dan salam atas junjungan Muhammad SAW. Keluarga , sahabat dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Nabi yang diutus Allah SWT. Sebagai uswatan hasanah bagi seluruh alam semesta.

Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, penulis banyak menghadapi kesulitan. Namun, dengan ketabahan dan ketekunan yang disertai dengan doa, bantuan, petunjuk, masukan dan dorongan moril dari berbagai pihak, sehingga Alhamdulillah skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terimakasi yang sedalam-dalamnya kepada kedua orang tua tercinta, ayah handa Nasir Hanapi dan ibunda Najewang yang senantiasa memanjatkan doa kehadirat Allah Swt. Memohon kesalamatan dan kesuksesan bagi putrinya, telah mengasuh dan mendidik penulis dengan kasih sayang sejak kecil hingga sekarang. Begitu banyak pengorbanan yang telah diberikan kepada penulis baik secara moril maupun meteril. Sungguh

penulis sadar tidak mampu untuk membalas semua itu. Hanya doa yang dapat penulis berikan, semoga senantiasa berada dalam limpahan kasih sayang Allah SWT.

Selanjutnya, penulis juga mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yaitu:

1. Prof. Dr. Abdul Pirol, M. Ag., Selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, Dr. H. Muammar Arafat, S.H., M.H. Selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. Ahmad Syarieff Iskandar, M.M. Selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Dr. Muhaemin, MA. Selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, yang telah membina dan berupaya meningkatkan mutu perguruan tinggi ini, tempat penulis menimba ilmu pengetahuan.
2. Dr. Takdir, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Palopo beserta Wakil Dekan Bidang Akademik, Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.E.I., M.A. dan Tadjuddin, S.E., M.Si., Ak., CA., CSRS., CAPM., CAPF., CSRA., Selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan, dan Ilham S.Ag., M.A. Selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama beserta Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Madehang,,S.Ag.,M.Pd. selaku pimpinan perpustakaan IAIN Palopo beserta karyawan dan karyawati dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.

4. Hendra Safri. SE., M.M, selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah di IAIN Palopo beserta staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
5. Akbar Sabani, S.E.I., M.E. selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi.
6. Hendra Safri. SE., M.M. selaku dosen penguji I dan Hamida, M.Ag. selaku dosen penguji II, yang memberikan kritikan serta arahan untuk penyelesaian skripsi ini.
7. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag selaku dosen pimbimbing akademik serta bapak ibu dosen dan Staf IAIN Palopo yang telah banyak membantu dan memberikan tambahan ilmu, khususnya dalam bidang pendidikan agama islam.
8. Kepala perpustakan Madehang,.S.Ag.,M.Pd dan segenap karyawan IAIN Palopo yang telah memberikan peluang untuk mengumpulkan buku-buku dan melayani penulis untuk keperluan studi kepustakaan dalam penulisan skripsi ini.
9. Jamiluddin Jasman. Selaku kepala Desa Buntu Terpedo , Aparat Desa Buntu Terpedo dan Masyarakat Desa Buntu Terpedo. yang telah meluangkan waktunya dan memberikan tambahan ilmu dan informasi dalam penyelsainyan skripsi ini.
10. Kepada kakak saya Naswandi dan Rahmat Hidayat yang telah memberikan support dan bantuanya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

11. Kepada sahabat Patnert Ambisi, Nazar, Fadilla Fahma, Annisa Lehing, Lisda, Farradyba, dan Anggita. Yang selalu senantiasa setia, menemani dan mendukung, berbagi pikiran, dan telah rela mengorbankan tenaga dan waktunya untuk membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Kepada teman-teman KKN posko Kalaena (Maulana, Sri Juwita David, Helma Kartika Rizki, Wardaniar, Siska Wulandari, Wahyuni Azahra. yang senantiasa menjaga kekompakan, persaudaraan, dan bersedia membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Kepada semua teman seperjuangan Perbankan Syariah Angkatan 2018 (khususnya kelas E) yang sudah membantu serta senantiasa memberikan saran sehubungan dengan penyusunan skripsi ini.

Teriring doa, semoga mereka mendapat pahala yang setimpal dari Allah Swt. Semoga skripsi ini menjadi salah satu wujud penulis dan bermanfaat, serta dapat bernilai ibadah di sisi-Nya Aamiin.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dalam rangka kemajuan sistem ekonomi Islam dan semoga usaha penulis bernilai ibadah disisi Allah Swt. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kekeliruan serta masih jauh dari kesempurnaan . oleh karna itu, saran dan kritik yang sifatnya membangun, penulis menerima dengan hati yang ikhlas. Semoga skripsi ini menjadi salah satu wujud penulis dan bermanfaat bagi yang memerlukan serta dapat bernilai ibadah di sisi-Nya Aamiin.

Palopo, 25 Oktober 2022

Riki Rinaldi

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Transliterasi Arab-Latin

Transliterasi mengalihaksarkan suatu tulisan kedalam aksara lain.

Misalnya, dari Arab ke aksara Latin.

Berikut ini adalah surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1997 tentang transliterasi Arab-Latin yang peneliti gunakan dalam penulisan skripsi ini.

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa arab dan transliterasinya kedalam huruf latin dapat dilihat dibawah ini:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta	T	Te
س	Sa'	Ş	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je

ه	Ha'	H	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	KH	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik diatas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Şad	Ş	Es dengan titik di bawah
ض	Dad	D	De dengan titik dibawah
ط	Ta	T	Te dengan titik dibawah
ظ	Za	Z	Zet dengan titik dibawah
ع			

	‘Ain	‘	Koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

2. Vokal

Vokal tunggal bahasa arab yang lambangnya berupa tanda dia kritik atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اً	<i>fathah</i>	A	A
اً	<i>Kasrah</i>	I	I
اً	<i>dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اً	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
اً	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *haulā*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
....ي.....ا	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
اً	<i>kasrah dan yā'</i>	Ī	i dan garis di atas
اً	<i>dammah dan wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَاءٌ : *ramā*

قَيْلٌ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al-serta bacaan kedua kata itu terpisah, makat *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالُ : *raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fādilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. *Syaddah* (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd*, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَحْيَنَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-ḥaqq</i>
نُعْمَانٌ	: <i>nu'ima</i>
عَدُوٌّ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf *aber-tasyid* diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah*, maka ia ditransiliterasikan seperti huruf *maddah* menjadi ī.

Contoh:

عَلَيْهِ	: 'Ali (bukan 'Aliyy atau 'Aly)
عَرَبِيٌّ	: 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ՚ (alif lam ma 'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang di transliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsi yah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf lansung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَالُ	: <i>al-zalzalah</i> (<i>az-zalzalah</i>)

الْفَلْسَفَةُ

:*al-falsafah*

الْبِلَادُ

:*al-bilādu*

7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ

: *ta'murūna*

الْتَّوْعُ

:*al-nau'*

شَيْءٌ

:*syai'un*

أُمِرْتُ

:*umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum di bakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), Alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka wajib ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Syarh al-Arba 'in al- Nawāwī

Risālah fī Ri'āyah al-maṣlahah

9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagaimudāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاللهِ دِينُ اللهِ $\hat{d}inullāh$ $\hat{b}illāh$

Adapun *tā' marbutahdi* akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

بِرَحْمَةِ اللهِ هُمْ فِي رَحْمَةٍ $\hat{h}um fī rahmatillāh$

10. *Huruf Kapital*

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menulis huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang

didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallażī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-lażīunzila fīhi al-Qur'ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Naṣr Ḥāmid Abū Zayd

Al-Ṭūfi

Al-Maṣlaḥah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd,
Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd
Muḥammad Ibnu)

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid
(bukan: Zaīd, Naṣr Ḥāmid Abū)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

SWT. = *subḥānahūwa ta 'ālā*

SAW. = *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam*

as	= ‘alaihi al-salām
H	=Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
I	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
W	= Wafat tahun
QS .../...: 4	= QS al-Baqarah/2: 4 atau QSĀli ‘Imrān/3: 4
HR	= Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PRAKATA	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	ix
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR AYAT	xx
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR GAMBAR	xxii
DAFTAR ISTILAH	xxiii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiv
ABSTRAK	xxv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Batasan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	9
BAB II KAJIAN TEORI	11
A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan	11
B. Landasan Teori	14
C. Kerangka Pikir	17
BAB III METODE PENELITIAN	19
A. Jenis Penelitian	19
B. Fokus Penelitian	19

C. Definisi Istilah	20
D. Desain Penelitian	21
E. Data dan Sumber Data	22
F. Instrumen Penelitian	23
G. Pemeriksaan Keabsahan Data	24
H. Teknik Analisis Data	26
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	29
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	29
B. Usaha Yang Dikelola Badan Usaha Milik Desa Buntu Terpedo Kec. Sabbang Kab. Luwu Utara	34
C. Pengelolaan Dana Badan Usaha Milik Desa Buntu Terpedo Kec. Sabbang Kab. Luwu Utara	36
D. Permasalahan Yang Mengakibatkan Tidak Terjalannya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	41
BAB V PENUTUP	56
A. Kesimpulan	56
B. Saran	57
DAFTAR PUSTAKA	59
LAMPIRAN	

DAFTAR AYAT

Q.S Al- Anbiya 20: 107

2

DAFTAR TABEL

Tabel 1 1 Berikut Jenis Usaha Badan Usaha Milik Desa Buntu Terpedo
Kabupaten Luwu Utara Kecamatan Sabbang 33

Tabel 4 1 Rekapitulasi Laporan Data Penduduk Desa Buntu Terpedo Bulan

Agustus 2022

58

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2 1 Kerangka Pikir Peneliti 2022 43

Gambar 4 1 Struktur Organisasi BUMDes Terpedo 59

DAFTAR ISTILAH

APBN : Anggaran pendapatan dan belanja negara adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara Indonesia yang disetujui oleh dewan perwakilan rakyat.

APBD : Rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia disetujui oleh dewan perwakilan rakyat daerah.

Bumdes Brokering & Renting : yaitu jasa pembayaran listrik dan penyewaan, yang memiliki tujuan dan sifat yaitu untuk meningkatkan pendapatan desa.

BUMDES Tranding : yaitu bisnis yang menyediakan kebutuhan pokok serta bisnis hasil pertanian yang memiliki tujuan dan sifat yang pertama internal desa dan melayani kebutuhan masyarakat.

DAFTAR LAMPIRAN

<i>Lampiran 1 Daftar Informan</i>	65
<i>Lampiran 2 Pedoman Wawancara Perangkat Desa dan BUMDES</i>	66
<i>Lampiran 3 Pedoman Wawancara Untuk Masyarakat</i>	68
<i>Lampiran 4 Dokumentasi Penelitian</i>	70

ABSTRAK

Riki Rinaldi, 2022 *“Efektivitas Pengelolaan Dana Badan Usaha Milik Desa Buntu Terpedo Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara”* Skripsi Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo, Di Bimbing oleh Akbar Sabani S. Ei., M.E

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis-jenis usaha yang dikelola, pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Buntu Terpedo Kec. Sabbang Kab. Luwu Utara serta permasalahan yang mengakibatkan tidak berjalannya BUMDES. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Pengumpulan data berupa dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa usaha yang dikelola Badan Usaha Milik Desa di Desa Buntu Terpedo Kec. Sabbang Kab. Luwu Utara yaitu: Metode Simpan Pinjam dan BUMDES *Brokering & Serving*, BUMDES Tranding. Solusi untuk mengatasi usaha BUMDES yang tidak berkembang di masyarakat harus memiliki ide kreatif lainnya yang bisa dikembangkan di Desa Buntu Terpedo Kec. Sabbang Kab. Luwu Utara. Adapun dampak positif yaitu meningkatkan perekonomian, kesejahteraan dan meningkatkan kesehatan masyarakat. Dampak negatifnya kadang merasakan rugi karena banyaknya persaingan dalam hal berjualan. Peranan BUMDES sangat bermanfaat karena masyarakat sudah banyak produkyang dijual dan masyarakat jadi mempunyai pekerjaan dan mengurangi angkapengangguran. Kemudian Peranan perangkat Desa itu juga penting bagi keberadaan kegiatan BUMDES Desa Buntu Terpedo Kec. Sabbang Kab. Luwu Utara dalam penyaluran waktu, tenaga dan pemikiran sehingga membuat kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Kata Kunci: Pengelolaan, Badan Usaha Milik Desa.

ABSTRAC

Riki Rinaldi, 2022 *"Effectiveness of Fund Management for Village-Owned Enterprises (BUMDES) in Buntu Terpedo Village, Sabbang District, North Luwu Regency"* Thesis of the Sharia Banking Study Program, Faculty of Islamic Economics and Business, Palopo State Islamic Institute, Guided by Akbar Sabani S. Ei., M.E

This study aims to determine the types of businesses managed, management of village-owned enterprises Buntu Terpedo Kec. Sabbang Kab. North Luwu and the problems that caused it to fail BUMDES. The research approach used in this study is descriptive qualitative research method. Data collection in the form of observation, interview and documentation. From the results of this study, it can be concluded that the business managed by the Village-Owned Enterprises in Buntu Terpedo Village, Kec. Sabbang Kab. North Luwu, namely: Savings and Loans Method and BUMDES Brokering & Serving, BUMDES Trading. Solutions to overcome BUMDES businesses that are not developing in the community must have other creative ideas that can be developed in Buntu Terpedo Village, Kec. Sabbang Kab. North Luwu. The positive impacts are improving the economy, welfare and improve public health. The negative impacts sometimes feel a loss because of a lot of competition in terms of selling. The role of BUMDES is very useful because the community has many products that are sold and people have jobs and reduce the number of unemployment. Then the role of the village apparatus is also important for the existence of BUMDES activities in Buntu Terpedo Village, Kec. Sabbang Kab. North Luwu. In distribution of time, energy and thought so as to make activities that are in accordance with the community needs.

Keywords: Management, Village Owned Enterprises.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa merupakan unit terkecil disuatu negara namun memiliki peran penting untuk mencapai cita-cita suatu bangsa dan negara. Bahkan apabila kita ingin menilai suatu bangsa itu sejahtera atau tidak dapat dilihat dari kemajuan sebuah desa, tidak hanya itu saja harus adanya dorongan terus menerus bagi tumbuh kembangnya potensi alamiah dan potensi dinamik pedesaan. Dengan berlakunya undang-undang 6 tahun 2014 menjadi awal dari sebuah desa untuk menentukan peran dan kewenangannya. Harapanya pemerintah desa dapat membangun perekonomian masyarakat desa menuju desa yang mandiri.¹

Desa mandiri saat ini menjadi isu penting yang perlu diperhatikan secara lebih serius serta didiskusikan secara lebih mandala. Pasalnya, sejak UU No 6/2014 tentang desa disahkan, kebijakan utama yang dibawa adalah diberikanya alokasi dana desa diperkirakan berkisar Rp 30-800 Juta per Desa, diperoleh dari dana gabungan APBN, APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota. Kebijakan berupa disentralisasi fisikal ke desa ini menunjukkan bentuk keberpihakan yang besar dan progresif dari pemerintah pusat akan prioritas peningkatan pembangunan daerah dalam pelayanan masyarakat demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat desa.

¹Triyanto. “*Analisis Kinerja Pendamping Desa Dalam Upaya Membangun Kemandirian Desa*” Jurnal Penilitian Sosial Dan Politik. Volume 7 No. 2. (Desember 31, 2018): 56, <http://journals.unihaz.ac.id>

Dana tersebut dapat digunakan sebagai modal pembagunan desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sesuai pasal 87-90 pada UU No 6/2014 dengan maksud untuk mendorong peningkatan skala ekonomi usaha produktif rakyat desa. Harus disadari, posisi desa sangat strategis untuk membangun sebuah negara. Sebab, desa menjadi ujung tombak identifikasi masalah. Kebutuhan masyarakat dilevel akar rumput sampai perencanaan dan realisasi tujuan bernegara terdapat ditingkat desa. Demikian pula masalah Kesehatan seperti balita dengan gizi buruk dan resiko kematian pada ibu melahirkan, terdapat paling banyak di desa dipengaruhi lagi dengan kondisi ketertinggalan perekonomian desa yang memicu meningkatnya jumlah angka kemiskinan negara.²

Dalam era otonomi juga perlu diberikan kebijakan yang memberikan akses dan memberikan kesempatan kepada desa untuk dapat menggali potensi baik sumberdaya alam maupun sumberdaya manusia yang berada dalam wilayah desa tersebut yang nantinya digunakan sebagai sumber pendapatan Desa. Dalam Al-qur'an juga sudah dijelaskan bahwa kesejahteraan sudah ada pada zaman Nabi Muhammad saw, dan menjadi misi bagi kerasulan Nabi Muhammad saw sebagaimana dinyatakan dalam QS. Al-Anbiya (21 : 107) yang berbunyi:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Terjemahan: “Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam”.

²Sidik, “Mengali Potensi Lokal Mewujudkan Kemandirian Desa, Sekolah Tinggi Pembagunan Masyarakat Desa (APBD)”, Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik Volume 19, No. 2. (Mei, 2015) 116. <http://doi.org/10.22146/jkap.7962>

Kegiatan ekonomi telah menjadi sarana pencapaian kesejahteraan atau kemakmuran. Nabi Muhammad saw memperkenalkan sistem ekonomi Islam, konsep kesejahteraan ini yang akan dibahas dalam tatanan ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah ilmu yang multidimensi/ interdisiplin, komprehensif, dan saling terintegrasi, meliputi ilmu Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan As Sunnah, dan juga ilmu rasional, dengan ilmu manusia dapat mengatasi masalah masalah keterbatasan sumber daya untuk mencapai falah (kebahagiaan).³

Salah satu cara untuk mencapai pertumbuhan ekonomi wilayah pedesaan adalah melalui pertumbuhan Lembaga mikro desa, dan salah satu Lembaga mikro di wilayah pedesaan adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). BUMDES merupakan Lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan membangun kerekatan sosial masyarakat yang di bentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Pengelolaan BUMDES bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi desa melalui pengembangan usaha ekonomi. Pembentukan BUMDES dimaksud guna mendorong/menampung seluruh kegiatan peningkatan pendapatan masyarakat. Baik yang berkembang untuk menurut adat istiadat/budaya setempat. Pengelolaan unit-unit usaha di bawah BUMDES merupakan pengelolaan yang lebih tepat dibandingkan pengelolaan dibawah koperasi.⁴ Dasar hukum pembentukan BUMDES adalah peraturan Menteri dalam Negeri Republik

³ Veithzal Rivai, Andi Buchari, Islamic Economics, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 91

⁴ Garniers Lellyana Sagita, "Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Berdasarkan UU NO 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Study Kasus di BUMDes Tirta Mandiri Klaten)", Publikasi Ilmiah, Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017

Indonesia Nomor 39 Tahun 2010. BUMDES dibentuk berdasarkan musyawarah masyarakat desa dan disahkan dengan peraturan Desa (perdes), dimasing-masing desa hanya dapat didirikan satu unit bumdes dan pendirianya harus berdasarkan kemampuan dan potensi masing-masing desa.

Perkembangan perekonomian di Indonesia yang sulit diprediksi dan tuntutan akan kesejahteraan diseluruh lapisan masyarakat masih menjadi agenda dalam penyelsaian permasalahan tersebut. Untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, desa merupakan agen pemerintah yang dapat menjangkau kelompok sasaran masyarakat yang hendak disejahterakan. Salah satunya dengan membentuk badan usaha yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). Tetapi dalam perjalanan BUMDES terdapat berbagai permasalahan dalam pengelolaan seperti komunikasi, pemberdayaan masyarakat local, kapasitas manajerial, infrastruktur, transaksi dan akuntabilitas laporan keuangan.⁵

Kegiatan operasional BUMDES sering juga menghadapi kendala-kendala, seperti permasalahan dalam permodalan, sistem manajemen yang belum bagus dan kualitas sumber daya yang masih rendah. Permasalahan pokok yang sering dihadapi oleh BUMDES kualitas kinerja sumber daya manusia yang masih rendah. Kinerja karyawan akan sangat mempengaruhi kinerja BUMDES, tinggi rendahnya tingkat kinerja karyawan dan pengelolaan Lembaga akan berpengaruh terhadap kinerja Lembaga. Lemahnya kinerja pengelola dapat dilihat dari belum optimalnya pengelolaan bumdes untuk menyelsaikan pekerjaan, bekerja belum

⁵Irfan Nursetiawan, “Strategi Pengembangan Desa Mandiri Melalui Inovasi BUMDes, *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintah Dosen Program Studi Ilmu Pemerintah*”, Volume 4. No 2 (2018) 78-79. <http://Jurnal.uniginal.ac.id/index.php>

sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan yang menyebabkan rendahnya prestasi kerja, masih rendahnya tingkat disiplin kerja. Kinerja merupakan hasil kerja atau prestasi dan bagaiman proses suatu pekerjaan berlangsung. Pentingnya kinerja karyawan dalam hal ini pengelola BUMDES terhadap peningkatan kinerja BUMDES. Banyak faktor-faktor yang mempengaruhi secara signifikan terhadap peningkatan kinerja karyawan atau pengelola dapat dilihat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan maupun kinerja pengelola. Bawa konpensasi dalam bentuk gaji menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan, berarti dengan pemberian konfensi yang adil terhadap karyawan akan menyebabkan karyawan meningkatkan kinerjanya. Gaji merupakan suatu imbalan atau pendapatan yang diterima oleh seseorang baik berupa uang atau barang secara langsung maupun tidak langsung yang diterima secara priodik sebagai akibat dari pekerjaan yang telah dilakukan.

Faktor berikutnya adalah pengalaman kerja, yang memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja. Pengalaman kerja merupakan suatu pengetahuan dan keahlian yang dimiliki seorang sebagai akibat dari pekerjaan yang pernah dilakukan dalam satu priode terdahulu. Faktor selanjutnya yang berpengaruh terhadap kinerja seseorang adalah motivasi kerja. Tingkat motivasi kerja berpengaruh positif dan signifkat terhadap kinerja karyawan. Motivasi merupakan keiginan untuk melakukan usaha yang lebih tinggi dari priode sebelumnya untuk mencapai hasil yang lebih maksimal.

Faktor lainya yang dianggap berpengaruh terhadap kinerja seorang adalah gaya kepemimpinan memiliki pengaruh yang pengaruh yang positif dan signifikan

terhadap peningkatan kinerja seseorang atau karyawan. Pengertian untuk gaya kepemimpinan adalah pola khas yang dimiliki seorang pemimpin pada saat berhadapan dengan staf atau bawahan agar bersedia untuk melakukan sesuatu pekerjaan. Sementara untuk faktor pendidikan juga merupakan salah satu faktor yang mendukung tingkat kinerja karyawan. Teori Human Capital menyebutkan investasi dalam hal pendidikan akan dapat meningkatkan produktivitas yang akan berpengaruh terhadap penerimaan pendapatan seseorang. Pendidikan menurut undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan nasional, yang menyebutkan pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan Suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan negara karakteristik biografi terutama umur dianggap mempengaruhi kinerja seorang karyawan, ini disebabkan karena semakin tua umur dianggap mempengaruhi kinerja seorang karyawan, ini disebabkan karena semakin tua umur seorang pekerja memiliki sikap yang kurang luwes, memiliki pemikiran yang kurang bisa menerima kemajuan-kemajuan, semakin menurunnya tingkat keterampilan kecekatan dan kecepatan dalam menyelsaikan pekerjaan.

Hal ini berarti hubungan yang terbalik dengan tingkat kinerja seorang pekerja. Umur atau usia didefinisikan sebagai lamanya keberadaan seseorang diukur dalam satuan waktu dipandang dalam segi kronologik, individu normal yang memperlihatkan derajat perkembangan anatomic dan fisiologik sama.

Factor berikutnya yang dianggap mempengaruhi tingkat kinerja seseorang pekerja adalah lingkungan kerja terutama lingkungan kerja fisik. Dimana lingkungan kerja fisik yang nyaman dengan dukungan sarana dan prasara yang memadai akan meningkatkan semangat dan prestasi kerja seseorang. Lingkungan kerja seperti Suasana tempat kerja yang menyenangkan, hubungan rekan kerja yang harmonis, serta tersedianya fasilitas kerja yang baik berpengaruh terhadap kinerja pegawai.⁶

Tabel 1 1 Berikut Jenis Usaha Badan Usaha Milik Desa Buntu Terpedo Kabupaten Luwu Utara Kecamatan Sabbang

N o	Jenis Usaha
1.	PDAM
2.	Pembayaran Listrik
3.	Sembako

Berdasarkan tabel dapat diketahui bahwa usaha-usaha yang dikelola BUMDES Desa Buntu Terpedo Kabupaten Luwu Utara Kecamatan Sabbang terdapat 3 jenis usaha yaitu: PDAM, Pembayaran Listrik, dan sembako. BUMDES didirikan agar dapat meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah desa dalam penyelengaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapat masyarakat melalui berbagai kegiatan ekonomi masyarakat. Adapun tujuan BUMDES yaitu meningkatkan perekonomian desa, mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa.

⁶Swandari et al., *Life: The science of biology* “Analisis Faktor-Faktor Penentu Kinerja Karyawan BUMDes di Kabupaten Jembrana,” E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana 6.4 (2017): 1366-1370.

Pada proses pengelolaan BUMDes Desa Buntu Terpedo Kec. Sabbang Kab. Luwu Utara. Di temukan beberapa permasalahan yang harus diselsaikan oleh pengelola atau pengurus BUMDes yaitu:

1. masalah pengaturan organisasi

Pengarturan organisasi sangat dibutuhkan untuk kelancaran suatu usaha. Pengelola organisasi yang baik akan mendorong kemajuan dan perkembagan usaha. Tidak sedikit BUMDes yang akhirnya tidak bisa berkembang karena kurangnya pengaturan organisasi yang baik dalam BUMDes. Meskipun kepengurusan BUMDes sudah dibentuk, namun pada implementasinya, pengurus BUMDes belum bisa menjalankan tanggung jawab yang baik.

2. Menemukan dan Mengembangkan Potensi Desa

Desa adalah suatu wilayah dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri yang dikepalai oleh seseorang kepala desa, masing-masing desa memiliki potensi desa yang bisa dikembangkan, entah itu potensi dalam bidang sumber daya alam ataupun potensi dalam sumber daya manusia. Tantangan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh desa bisa dikatakan sulit, karena menyatukan masyarakat untuk mengembangkan desa tidaklah mudah. Banyak diantara mereka yang tidak mau mengembangkan potensi yang dimiliki desa dengan berbagai alasan. Perlu sekali dilakukan sosialisasi dan pelatihan SDM untuk mengubah cara berfikir masyarakat agar mau diajak mengelola potensi yang dimiliki desa secara bersama-sama

3. Masalah Promosi

BUMDes yang pengelolaanya dudah baik serta memiliki output yang berkualitas seringkali kesulitan dalam hal promosi. Hal tersebut tentunya membuat kepengurusan BUMDes harus benar-benar mampu melihat peluang dan pintar dalam mencari cara untuk melakukan promosi. Sebab akan menjadi percuma jika potensi desa sudah disulap menjadi produk namun tidak dapat terdistribusi dengan baik hanya karena masalah promosi yang kurang baik. Pada intinya penguru BUMDes tidak bisa berkerja sendiri. Masyarakat desa juga harusn ikut terlibat dalam pengelolaan BUMDes. Oleh karena itu, menjadi penting untuk memberikan pengertian melalui program sosialisasi dan pendekatan kepada masyarakat desa sehingga hal ini menjadi kunci keberhasilan BUMDes.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peniliti tertarik untuk meneliti mengenai “Efektivitas Pengelolaan Dana Badan Usaha Milik Desa Buntu Terpedo Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara.

B.Batasan Masalah

Agar penitian tidak melenceng penulis akan memberikan Batasan penitian. Agar pembahasan ini tidak meluas, maka penulis akan mengharuskan hanya membahas tentang bagaimana pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Buntu Terpedo Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara.

C.Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan di teliti penulis sebagai berikut :

1. Apa saja usaha yang dikelola Badan Usaha Milik Desa Buntu Terpedo Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara?
2. Bagaimana Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Buntu Terpedo Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara?

D.Tujuan Penilitian

Adapun tujuan penilitian yang ingin dicapai dari penilitian ini dengan melihat latar belakang masalah dan rumusan masalah diatas adalah sebagai berikut:

1. Ingin mengetahui jenis-jenis usaha yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa Buntu Terpedo Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara.
2. Ingin mengetahui pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Buntu Terpedo Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara.

E. Manfaat Penilitian

Manfaat yang diharap dalam penilitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penilitian ini diharapakan dapat menambah wawasan pengetahuan sosial dan bahan pertimbangan untuk penilitian sejenis yang berkaitan dengan strategi pemerintah dalam mengelola Dana Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa memberi manfaat pemikiran kepada pihak terkait, terutama pemerintah desa dalam pengelolaan Dana Badan Usaha Milik Desa (BUMDeS)

a. Manfaat bagi Pemerintah Desa

Diharapkan dapat menambah wawasan serta gambaran pengetahuan sosial dan bahan pertimbangan untuk pemerintah desa dalam mengelola Dana Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)

b. Manfaat bagi pengelola BUMDES

Penelitian ini dimaksud untuk mendukung keberadaan Pengelola Badan Usaha Milik Desa dan diharapkan bisa memberi manfaat guna mengembangkan potensi desa dan mengerakkan sumber ekonomi desa.

c. Manfaat bagi masyarakat yang mengelola dana BUMDES

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat desa megenai pengelolaan dana Badan Usaha Milik Desa agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam mensukseskan pengelolaan dana Badan Usaha Milik Desa serta menyeimbangkan kesejahteraan kehidupan masyarakat desa.

d. Manfaat bagi peneliti

Memberikan pengalaman, menjadi rujukan informasi bagi peneliti lain, hingga memberikan referensi tentang metode pendekatan yang sesuai. contohnya dalam menganalisis penegelolaan dana badan usaha milik desa (BUMDES)

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penilitian Terdahulu yang Relevan

Penilitian terdahulu yang relevan adalah bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandigan dan acuan, serta untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penilitian ini, maka peneliti mencantumkan hasil penilitian terdahulu.

1. Mujahid Anshori (2019) “Efektivitas Pengelolaan Bumdes Aik Mateng Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Aik Bual Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah”

Hasil penelitian menunjukkan BUMDes Aik Mateng Desa Aik Bual sebagai sarana atau unit usaha untuk memberdayakan ekonomi masyarakat, dalam pengelolaannya sudah berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah desa. Dari beberapa unit usaha yang dikelola BUMDes sudah bisa efektif berjalan karna sudah bisa membantu memberdayakan perekonomian masyarakat desa dan mengurangi angka pengangguran di Desa Aik Bual walaupun ada satu unit usaha yang dikelola BUMDes yang tidak bisa berjalan yaitu pengelolaan industry gula semut dan gula aren.⁷

2. Ferdiana Ayu Lestari (2019) “Efektifitas Pengelolaan Permodalan Usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam”

⁷ Mujahid Anshori, Skripsi “Efektivitas Pengelolaan Bumdes Aik Mateng Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Aik Bual Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah” Universitas Islam Negeri Mataram Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam (2019)

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa BUMDes Maju bersama dari tahun 2017 hingga 2019 telah mampu berkontribusi rata-rata 60% selama 3 tahun, hal ini dinilai BUMDes tidak efektif dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa walaupun unit usaha yang dijalankan pun telah mampu mencapai sasaran BUMDes yaitu masyarakat Desa Way Areng. Berdasarkan ekonomi Islam dapat dilihat bahwa dalam mengelola permodalan usahanya BUMDes telah sejalan dengan tujuan ekonomi islam dan prinsip-prinsip ekonomi Islam serta mampu menerapkan akad mudharabah dan ijarah.. Akan tetapi Pendapatan Asli Desa belum mampu menjadi sarana Redistribusi di Desa Way Areng Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur.⁸

3. Adi Firmansyah (2018) “Efektivitas Dan Efesiensi Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Miilk Desa(Bumdes) Di Kec.Tanete Riaja Kab. Barru”

Berdasarkan hasil penelitian bahwa dari beberapa jenis usaha BUMdes Di Kecamatan Tanete Riaja dalam konsep Efektivitas Dan Efesiensi Pengelolaan Keuangan BUMdes Kecematan Tanete Riaja, masih belum terlalu Efektif Dan Efesien karna pada dasarnya belum dapat mengelola potensi Desa dengan baik sebagai mana yang diungkapkan oleh peneliti terdahulu.yaitu dimana kehadiran BUMdes mampu mengelola Sumber Daya Alam dengan baik serta mampu menjadikan sebagai sumber pendapatan asli Desa untuk menjadikan Desa yang

⁸ Ferdiana Ayu Lestari, Skripsi “Efektifitas Pengelolaan Permodalan Usaha Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam” Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Jurusan: Ekonomi Syariah (2019)

Mandiri di Kecamatan Tanete Riaja. Namun BUMdes Mattirowalie mampu memberikan tingkat ke efesien yang cukup yaitu 0.808.⁹

4. Dzini Nuraeni (2021) “Efektivitas Program Bumdes Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus Bumdes Unggul Bahtera Desa Babakan, Kec. Karanglewas, Kab. Banyumas)”

Hasil penelitian menunjukan bahwa program pemberdayaan ekonomi masyarakat desa oleh BUMDes Unggul Bahtera yaitu ada lima, dua program termasuk program dalam perencanaan yaitu unit usaha pemasangan wifi dan pertashop, dan yang terealisasi yaitu program unit usaha air bersih, toko dan isi ulang air mineral (Galon). Indikator yang digunakan peneliti dalam mengukur efektivitas yaitu teori Makmur dengan empat indikator yaitu Ketepatan penggunaan biaya, ketepatan berfikir, ketepatan sasaran, ketepatan tujuan. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam program unit usaha toko secara keseluruhan indikator belum efektif dan untuk unit usaha air bersih dan isi ulang air mineral dapat dikatakan efektif.¹⁰

⁹ Adi Firmansyah, Skripsi “Efektivitas Dan Efesiensi Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa(Bumdes) Di Kec.Tanete Riaja Kab. Barru” Universitas Muhammadiyah Makassar Jurusan Akuntansi (2018)

¹⁰ Dzini Nuraeni, Skripsi “Efektivitas Program Bumdes Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus Bumdes Unggul Bahtera Desa Babakan, Kec. Karanglewas, Kab. Banyumas)” Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto Jurusan Ekonomi Syariah (2021)

B. Landasan Teori

Penelitian ini didasari oleh teori mengenai BUM Desa, teori manajemen dan teori mengenai kinerja.

1. BUM Desa

Berdirinya BUM Desa dilandasi oleh Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 213 ayat (1) disebutkan bahwa “Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa” dan tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 tahun 2005 tentang Desa. Tujuan pendirian BUM Desa diharapkan menjadi pioner dalam menjembatani upaya penguatan ekonomi pedesaan. Menurut Pasal 1 ayat 2 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015, tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Menurut Pasal 2, Pendirian BUMDesa dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar-Desa.

2. Manajemen

Organisasi adalah kesatuan yang terbentuk oleh beberapa orang yang memiliki sedikit atau semua kesamaan tentang latar belakang, identitas, harapan,

dan berbagai hal lainnya untuk mencapai tujuan bersama secara bersama-sama (Duha, 2018). Management berasal dari kata *to manage* yang berarti “mengatur”. Dalam hal mengatur, akan timbul masalah, *problem*, proses dan pertanyaan tentang apa yang diatur, siapa yang mengatur, mengapa harus diatur dan apa tujuan pengaturan tersebut. Manajemen juga menganalisa, menetapkan tujuan/sasaran serta mendeterminasi tugas-tugas dan kewajiban-kewajiban secara baik, efektif dan efisien .

Menurut Manulang (2006), manajemen merupakan sebuah seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusun, pengarahan dan pengawasan dari pada sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang dilaksanakan. Berarti manajemen merupakan perilaku atau aktivitas anggota dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuannya. Dengan kata lain, organisasi adalah wadah bagi operasionalisasi manajemen. Karena itu didalamnya ada sejumlah unsur pokok yang membentuk kegiatan manajemen, yaitu: unsur manusia (*man*), barang-barang (*materials*), mesin (*machines*), metode (*methods*), uang (*money*) dan pasar (*market*). Keenam unsur ini memiliki fungsi masing-masing dan saling berinteraksi atau mempengaruhi dalam mencapai tujuan organisasi terutama proses pencapaian tujuan secara efektif dan efisien (Wijaya & Rifa'i, 2016).

3. Kinerja

Kinerja merupakan suatu hasil karya dari pelaksanaan pekerjaan tertentu. Menurut Dokko (2004), dua hal yang dapat mengukur kinerja organisasi yaitu produktivitas dan daya inovasi. Produktivitas adalah aspek dari kinerja tentang

seberapa banyak dan cepat suatu pekerjaan dapat diselesaikan sedangkan, daya inovasi adalah aspek dari pekerja untuk melihat ke depan dan melakukan sebuah perubahan untuk memperbaiki kinerjanya. Pengertian kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan padanya.

Kinerja menurut Fahmi (2011) adalah hasil yang diperoleh oleh suatu organisasi baik organisasi tersebut bersifat profit oriented dan non profit oriented yang dihasilkan selama satu periode waktu. Kinerja merupakan prestasi yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugasnya atau pekerjaannya selama periode tertentu sesuai standar kriteria yang telah ditetapkan untuk pekerjaan tersebut (Ismail, 2010). Berikut faktor yang mempengaruhi kinerja menurut Mangkunegara (2013) adalah sebagai berikut :

- a. Faktor Kemampuan, secara psikologis kemampuan pegawai terdiri dari kemampuan potensi (IQ) dan kemampuan realiti (skill).
- b. Faktor Motivasi, motivasi terbentuk dari sikap seorang pegawai dalam menghadapi situasi 5 Rahmawati, Analisis Pengelolaan Badan kerja. Motivasi merupakan kondisi yang menggerakkan diri pegawai yang terarah untuk mencapai tujuan organisasi.

D.Efektivitas

Efektifitas umumnya di pandang sebagai tingkat pencapaian tujuan operatif dan operasional. Pada dasarnya efektifitas adalah tingkat pencapaian tugas sasaran organisasi yang di tetapkan. Efektifitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana seseorang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Ini dapat di artikan, apabila suatu pekerjaan dapat dilakukan sesuai dengan yang direncanakan, dapat dikatakan efektif tanpa memperhatikan waktu, tenaga dan yang lainnya. Sedangkan efektifitas pelaksanaan kebijakan otonomi daerah adalah sejauh mana kegiatan pemerintah daerah dapat melaksanakan, mewujudkan, dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, pengambilan keputusan partisipasi masyarakat. Pelaksanaan pembangunan dan juga penyelesaian berbagai permasalahan dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Sondang P. Siagian yang berpendapat efektifitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar di tetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektifitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektifitasnya. Apabila seseorang berbicara tentang efektifitas sebagai orientasi kerja berarti yang menjadi sorotan perhatian adalah tercapainya berbagai sasaran yang telah ditentukan tepat pada waktunya dengan menggunakan sumber-sumber tertentu yang sudah digunakan harus ditentukan sebelumnya dan dengan memanfaatkan sumber-sumber itulah maka hasil-hasil tertentu harus dicapai dalam waktu yang telah di tetapkan pula.

Organisasi senantiasa melibatkan beberapa orang dan mereka saling berinteraksi secara insentif. Interaksi tersebut dapat disusun atau digambarkan dalam sebuah struktur untuk membantu mencapai tujuan bersama. Namun demikian, setiap orang dalam organisasi mempunyai tujuan perorangan. Dengan keikutsertaannya dalam organisasi, ia mengharapkan agar organisasi tersebut akan membantu dia mencapai tujuannya di samping tujuan kelompok.

Keberhasilan organisasi pada umumnya diukur dengan konsep efektivitas, apa yang dimaksud efektivitas, terdapat perbedaan pendapat diantara yang menggunakannya, baik dikalangan akademisi maupun dikalangan para praktisi. Dalam suatu perusahaan, agar pelaksanaan kerja dapat mencapai prestasi, yang terlibat tidak hanya sekedar sekumpulan orang saja, melainkan juga melibatkan perlengkapan, termasuk mesin-mesin, metode kerja, waktu, material, yang umumnya disebut sebagai sumber. Setiap organisasi menginginkan agar pelaksanaan kerja dan penggunaan sumber tersebut benar-benar dapat berdaya guna. Dengan demikian, perlu adanya pengaturan, pengarahan, dan pendayagunaan. Usaha mengatur dan mengarahkan sumber daya ini, baik manusia maupun peralatannya disebut manajemen. Suatu organisasi dinilai mencapai efektivitas tinggi bila bebas dari berbagai karakteristik ketidakefektifan. Keuntungan model dasar ini adalah memberikan kepada para manajer pedoman-pedoman praktis bagi kegiatan diagnosis dan pengembangan. Model ketidakefektifan paling cocok bila kriteria efektivitas tidak dapat diidentifikasi atau tidak dapat disetujui bersama dan bila ada kebutuhan untuk mengembangkan secara sistematik strategi-strategi pengembangan organisasi.

Mengenai efektivitas organisasi didasarkan pada teori sistem dan dimensi waktu. Berdasarkan teori sistem bahwa efektivitas organisasi harus dapat menggambarkan seluruh siklus input dan siklus output proses dan juga harus mampu menggambarkan hubungan timbal balik yang harmonis antara organisasi dengan lingkungan yang lebih luas. Sedangkan berdasarkan teori dimensi waktu bahwa organisasi diartikan sebagai suatu elemen dari sistem yang lebih besar (lingkungan) dengan melalui berbagai waktu dalam mengambil sumber daya, terus memprosesnya dan akhirnya menjadi barang jadi yang akan dikembalikan kepada lingkungannya. Efektivitas organisasi mencakup dari individu dan kelompok. Efektivitas individu menekankan hasil kerja karyawan atau anggota tertentu dari orgnaisasi. Tugas yang harus dilakukan biasanya ditetapkan sebagai bagian dari pekerjaan atau posisi dalam organisasi. Efektivitas kerja diketahui lewat prestasi kerjanya. Efektivitas kelompok adalah jumlah kontribusi dari semua anggotanya. Dalam beberapa hal efektivitas kelompok adalah lebih besar daripada jumlah kontribusi tiap-tiap individu.

Efektifitas pengorganisasian dapat dianggap sebagai alat pengukur kualitas hubungan sebuah organisasi dengan lingkungannya. Secara paradoksal dapat dikatakan bahwa sebuah organisasi mungkin efektif (suatu hubungan langgeng dengan lingkungannya) tetapi tidak efesien (secara interen ia penuh pemborosan). Kemudian Richard, M. Streert mengemukakan ada empat faktor yang mempengaruhi efektifitas organisasi yaitu :

1. Karakteristik organisasi terdiri dari struktur organisasi dan teknologi struktur adalah cara organisasi untuk menyusun orang-orang untuk menciptakan sebuah organisasi.

2. Karakteristik lingkungan mencapai dua aspek yang saling berhubungan yaitu lingkungan ekstren dan lingkungan intern. Lingkungan ekstren yaitu semua lingkungan kekuatan yang timbul diluar batasan-batasan organisasi. Lingkungan intern pada umumnya dikenal sebagai iklim organisasi yang meliputi bermacam-macam atribut-atribut lingkungan saja.

3. Karakteristik lingkungan dalam bekerja memiliki pandangan tujuan kebutuhan dan kemampuan yang berbeda-beda individu ini memiliki pengaruh langsung terhadap rasa keterkaitan pada organisasi dan prestasi kerja.

4. Kebijakan dan praktek manajemen dibutuhkan suatu organisasi untuk mewujudkan suatu keberhasilan melalui perencanaan, koordinasi, sehingga dapat memperlancar kegiatan yang dituju kearah sasaran.

Pengertian yang memadai mengenai tujuan ataupun sasaran organisasi merupakan langkah pertama dalam pembahasan mengenai efektifitas tersebut seringkali berhubungan sangat erat dengan tujuan ataupun sasaran yang ingin dicapai oleh organisasi. Efektifitas ini sesungguhnya merupakan suatu konsep yang luas, mencakup beberapa faktor di dalam maupun di luar organisasi. Efektifitas merupakan suatu konsep yang sangat penting dalam teori organisasi, karena mampu memberikan gambaran mengenai keberhasilan organisasi dalam mencapai sasarannya. Tetapi pengukuran efektifitas organisasi.

bukanlah suatu hal yang sederhana. Berbagai pendekatan dalam pengukuran efektifitas organisasi dapat dilihat dari pendapat Matini & lubis yaitu :

1. Pendekatan sasaran (goal approach) Pengukuran sasaran dalam pengukuran efektifitas dimulai dengan identifikasi sasaran organisasi dan mengukur tingkat keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran tersebut. Dengan demikian pendekatan ini mencoba mengukur sejauh mana organisasi berhasil merealisasi sasaran yang hendak dicapainya.
2. Pendekatan sumber (system resource approach) Pendekatan sumber mengukur efektifitas melalui keberhasilan organisasi dalam mendapatkan berbagai macam sumber yang dibutuhkannya. Organisasi harus dapat memperoleh berbagai macam sumber yang dibutuhkannya dan juga untuk memelihara keandalan sistem organisasi agar bisa menjadi efektif.
3. Pendekatan proses (internal process approach) Pendekatan proses menganggap efektifitas sebagai efisiensi dan kondisi kesehatan dari organisasi internal. Pendekatan ini tidak memperhatikan lingkungan organisasi dan memusatkan perhatian terhadap kegiatan yang dilakukan terhadap sumber-sumber yang dimiliki oleh organisasi yang menggambarkan tingkat efisiensi serta kesehatan organisasi. Pendekatan proses umumnya digunakan oleh penganut pendekatan non-klasik (human relations) dalam teori organisasi yang terutama meneliti hubungan antara efektifitas dengan sumber daya manusia yang dimiliki oleh organisasi.

Model proses efektifitas merupakan model yang menekankan proses-proses pokok yang berhubungan dengan efektifitas dan tidak memandang efektifitas sebagai keadaan terakhir. Dengan demikian model ini mengakui bahwa baik organisasi maupun lingkungannya terus berubah. Model ini mengimplikasikan bahwa peranan penting dari manajemen adalah memahami bagaimana saling hubungan ini dapat memperbesar kemungkinan berhasilnya organisasi. Tiga dimensi utama dari model ini yang dijelaskan oleh Richards M.Steers yaitu :

1. Optimisasi tujuan Penggunaan ancangan optimisasi tujuan terhadap efektifitas organisasi memungkinkan diakuinya secara eksplisit bahwa organisasi yang berbeda mengejar tujuan berbeda pula. Dengan demikian nilai keberhasilan atau kegagalan relatif dari organisasi tertentu harus ditentukan dengan membandingkan hasil-hasilnya dengan tujuan organisasi dan bukan dengan pertimbangan sifat-sifat.
2. Perspektif sistem Aspek kedua dari ancangan multidimensi pada analisis efektifitas organisasi adalah penggunaan teori sistem terbuka. Penggunaan perspektif sistem menekankan pentingnya arti interaksi organisasi lingkungan. Perspektif ini memusatkan perhatian pada hubungan antara komponen-komponen baik yang terdapat di dalam maupun diluar organisasi, sementara komponen-komponen ini secara bersama-sama mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan organisasi.

3. Tekanan tingkah laku Aspek terakhir dari ancangan yang disarankan disini adalah tekanan pada pengertian mengenai tekanan tingkah laku manusia dengan pengaruhnya pada prestasi organisasi.

Faktor-faktor pengaruh utama atas efektifitas yang dikemukakan oleh Richards adalah:

1. Ciri organisasi Struktur dan teknologi organisasi dapat mempengaruhi segi-segi tertentu dari efektifitas dengan berbagai cara. Mengenai struktur ditemukan bahwa meningkatnya produktivitas dan efisiensi sering merupakan hasil dari meningkatnya spesialisasi fungsi, ukuran organisasi, sentralisasi pengambilan keputusan, dan formalisasi.

2. Ciri lingkungan Disamping ciri organisasi, lingkungan luar dan dalam juga telah dinyatakan berpengaruh atas efektifitas. Keberhasilan hubungan organisasi-lingkungan tampaknya amat bergantung pada tiga variabel kunci : (1) tingkat keterdugaan keadaan lingkungan. (2) ketepatan persepsi atas keadaan lingkungan, dan (3) tingkat rasionalitas organisasi. Ketiga faktor ini mempengaruhi ketepatan tanggapan organisasi terhadap perubahan lingkungan.

3. Ciri pekerja Faktor pengaruh penting yang ketiga atas efektifitas adalah para pekerja itu sendiri. Pada kenyataannya angota-anggota organisasi mungkin merupakan faktor pengaruh yang paling penting atas efektifitas karena tingkah laku mereka yang dalam rangka panjang akan mempelancar atau merintangi tercapainya tujuan organisasi.

4. Kebijakan dan praktek manajemen Mekanisme ini meliputi penetapan tujuan strategi, pencarian dan pemanfaatan sumber daya secara efisien, menciptakan lingkungan prestasi, proses komunikasi, kepemimpinan dan pengambilan keputusan dan adaptasi dan inovasi organisasi.
5. Penetapan tujuan strategi Jika efektifitas berkepentingan dengan kemampuan manajemen untuk mendapatkan dan mengatur sumber daya bagi pencapaian tujuan organisasi maka pemilihan tujuan-tujuan ini (baik yang opertaktif maupun operasional) menjadi faktor yang kritis. Pengertian penetapan tujuan meliputi identifikasi tujuan organisasi yang berlaku umum dan penetapan bagaimana berbagai tujuan, kelompok dan individu dapat memberikan sumbangannya bagi tujuan-tujuan ini.
6. Pencarian dan sumber daya Sehubungan dengan usaha manajemen dan memanfaatkan sumber daya, telah diidentifikasi tiga bidang yang saling berhubungan. Pertama adalah keharusan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai subsistem organisasi (sub sistem produktif, pendukung, pemeliharaan, penyesuaian, dan manajemen) sehingga setiap sub sistem memiliki sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan tugas utamanya. Kedua berhubungan dengan penetapan, pengimplementasian dan pemeliharaan pedoman-pedoman kebijakan.
7. Lingkungan prestasi Manajer wajib merancang lingkungan kerja yang memberikan fasilitas yang sejauh mungkin konsisten dengan sumber daya yang tersedia. Yang harus diperhatikan oleh manajemen dalam bidang ini meliputi :

(1) prosedur pemeliharaan dan penempatan pekerja, (2) pendidikan dan pengembangan pekerja, (3) desain tugas, (4) penilaian dan pemberian imbalan pada prestasi.

8. Proses komunikasi Adalah jauh lebih mudah mengidentifikasi persoalan dalam komunikasi organisasi daripada mencarkan pemecahannya. Langkah penting untuk meminimalkan masalah-masalah ini meliputi pengakuan bahwa komunikasi dalam organisasi menjalani suatu proses evolusi, yang membutuhkan waktu berkembang sampai menjadi seperti sekarang ini.

9. Kepemimpinan dan pengambilan keputusan Bila diketahui bahwa kepemimpinan dan proses pengambilan keputusan memegang peranan sentral dalam tingkah laku organisasi, kita wajib memperhatikan beberapa cabang variasi dalam proses-prosesnya sepanjang mereka mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan organisasi.

10. Adaptasi dan inovasi organisasi Sepanjang pembahasan mengenai sifat efektifitas organisasi, selalu ditekankan keharusan bagi para manajer untuk selalu siap menyesuaikan diri organisasi mereka dengan perubahan dalam lingkungan. Dalam kenyataannya adaptasi dan inovasi oleh banyak orang dianggap sebagai cap efektifitas itu sendiri.

Dari beberapa pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa efektifitas adalah seberapa besar tingkat kelektakan out put yang dicapai out put yang di harapkan dari sejumlah input. Sebuah pekerjaan dapat dilaksanakan secara tepat, efektif,

efesien apabila pekerjaan tersebut dilaksanakan dengan tepat sesuai dengan yang telah direncanakan.

Indicator efektivitas mengambarkan jangkauan akibat dan dampak (outcome) dari keluaran (output) program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan ,maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.

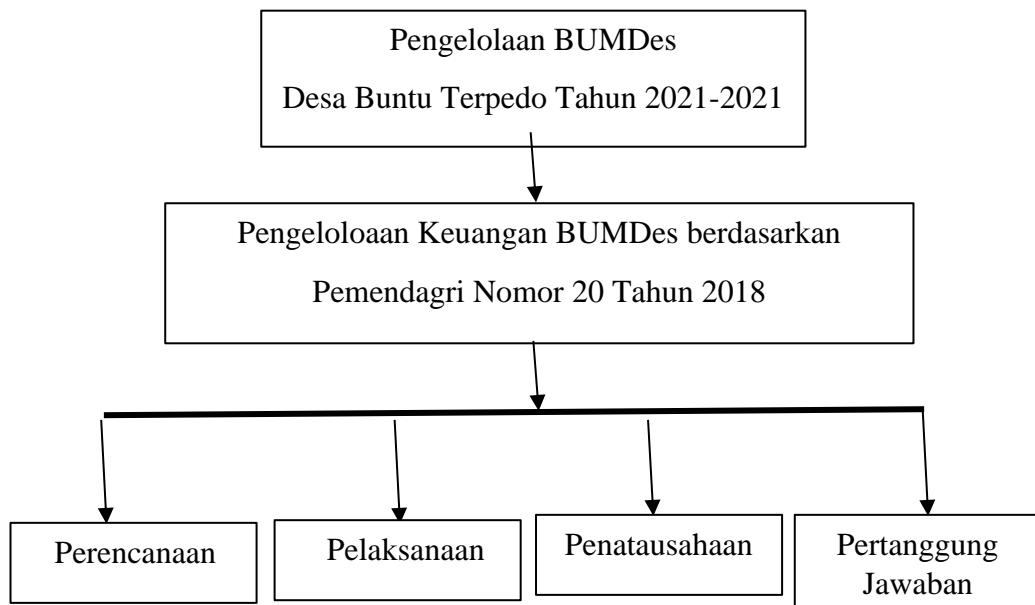
E. Efektivitas Menurut Peneliti

Efektivitas adalah ukuran tolak ukur berhasil tidaknya pencapaian dan perencanaan tujuan suatu organisasi mencapai tujuan. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif dan berjalan sesuai dengan apa dirancanakan pada awalnya.

B. Kerangka Pikir

Pemikiran menjelaskan gambaran permasalahan yang diteliti secara singkat. Badan usaha milik desa merupakan usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaanya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa. BUMDes dikelola oleh desa dan untuk desa. Oleh karena itu pengelolaan yang baik dan tepat akan berpengaruh terhadap keberlangsungan BUMDes. Kerangka pemikiran ini bertujuan untuk menjelaskan gambaran permasalahan secara singkat.

Gambar 2 1 Kerangka Pikir Peneliti 2022



Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, Desa Buntu Terpedo dilakukan dengan menganalisa menggunakan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang keuangan desa yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban. selanjutnya setiap tahap tersebut akan dilakukan analisis. Setelah selsai menganalisis setiap tahap kemudian menganalisis apakah Badan Usaha Milik Desa, Desa Buntu Terpedo sudah berkontribusi dalam pendapatan asli desa di Desa Buntu Terpedo. Tahap terakhir yaitu penarikan kesimpulan. berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan Prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diikuti dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan.

BAB III

METODE PENILITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penilitian

Penilitian ini menggunakan metode kualitatif, metode kualitatif adalah metode penilitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek (sebagai lawanya adalah eksperimen), yaitu penilitian adalah sebagai instrument kunci, Teknik pengumpulan data dilakukan triagulasi gabungan, analisi data bersifat induktif, dan hasil penilitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Metode penilitian dekspiptif kualitatif, dimaksud untuk eksplorasi dan klarifikasi megenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variable yang berkenan dengan masalah dan unit yang diteliti¹¹

B. Fokus Penilitian

Pengelola Badan Usaha Milik Desa, Kantor Desa Buntu Terpedo, dan masyarakat Desa Buntu Terpedo maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penilitian di daerah tersebut.

Penilitian ini dilaksanakan selama 2 bulan yaitu pada bulan April dan Mei 2022. Lokasi penilitian ini dilakukan di Desa Buntu Terpedo Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara.

¹¹ S. Margono, Metodologi Penilitian Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), h.25

C. Definisi Istilah

1. Efektivitas

Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada waktunya. Dapat disimpulkan bahwa efektivitas berkaitan dengan terlaksananya semua tugas pokok, tercapainya tujuan, ketepatan waktu, dan partisipasi aktif dari anggota serta merupakan keterkaitan antara tujuan dan hasil yang dinyatakan, dan menunjukkan derajat kesesuaian antara tujuan yang dinyatakan dengan hasil yang dicapai.¹²

2. Pengelolaan Dana

Pengelolaan Dana merupakan suatu realitas sosial dimana terdapat interaksi sosial antara berbagai pihak yang berkepentingan seperti pemerintah pusat dan kabupaten, perangkat desa, dan juga masyarakat.¹³

3. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

BUMDes Merupakan usaha usaha desa yang dikelola oleh pemerintah desa, dan berbadan hukum. Pemerintah desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.

¹² ID Tesis, “Teori Lengkap tentang Efektivitas Program menurut Para Ahli dan Contoh Tesis Efektivitas Program”, *Artikel* di akses dari <https://idtesis.com/teori-lengkap-tentang-efektivitas-program-menurut-para-ahli-dan-contoh-tesis-efektivitas-program/> pada tanggal 26 Oktober 2022 pukul 08.00

¹³ Ni Wayan Rustiarini, “Good Governance dalam Pengelolaan Dana Desa” (Universitas Mahasaraswati Denpasar) (Jurnal Simposium Nasional Akuntansi, 2016), h. 3

D. Desain Penilitian

Penilitian kualitatif merupakan penilitian yang berhubungan dengan hal-hal yang bersifat dinamis yang terjadi dilapangan

1. Fenomenologi

Merupakan pandangan berfikir yang menekankan pada fokus kepada pengalaman-pengalaman subjektif manusia dan intereptasi-inteptasi dunia. Studi fenemonologi mencoba mencari arti pengalaman dalam kehidupan. Peneliti menghimpun data berkenan dengan konsep, pendapat, pendirian, sikap, penilaian, dan pemberian makna terhadap situasi atau pengalaman dalam kehidupan

2. Grounded Theory (Teori Dasar)

Merupakan penilitian yang diarahkan pada penemuan atau minimal menguatkan suatu teori. Dengan kata lain, Grounded Theory merupakan prosedur penilitian kualitatif yang sistematis, dimana peneliti menerapkan konsep, proses, tindakan, atau interaksi suatu topik pada level konseptual yang luas. Penilitian dasar dilaksanakan dengan menggunakan berbagai teknik pengumpulan data, cek dan ricek ke lapangan, studi perbandigan antar kategori, hingga verifikasi sampai titik jenuh.

3. Etnografi

Studi mendalam mengenai tingkah laku yang alami yang berkaitan dengan kebudayaan atau keseluruhan kelompok sosial. Etnografi mencoba memahami

hubungan antara budaya dan tingkah laku, budaya dengan keyakinan/kepercayaan, nilai, konsep, sikap dari sekelompok orang.¹⁴

E. Data dan sumber data

Secara umum jenis dan sumber data dapat di klarifikasi menjadi dua bagian, yaitu data primer dan data sekunder. Dalam penilitian ini penulis menggunakan data primer dan data sekunder.

1. Data primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan melalui pihak pertama kepada pengumpul data yang biasanya melakukan wawancara, jejak dan lain-lain. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa sumber data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data dari pihak pertama kepada pengumpul data yang biasanya melalui wawancara, data yang diperoleh peniliti dari hasil wawancara dengan.

2. Data sekunder

Sekunder adalah data yang diperoleh sesorang peneliti secara tidak langsung dari objeknya, tetapi melalui sumber lain baik lisan maupun tulisan. Data sekunder adalah data atau sejumlah keterangan yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui sumber perantara. Data data ini diperoleh dengan cara

¹⁴ Muhammad Rijal Fadli, “*Memahami desain metode penelitian kualitatif*” (Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia) (Jurnal Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum Vol. 21. No. 1. (2021)), h.38

mengutip dari sumber lain, sehingga tidak bersifat autentik karena sudah diperoleh dari tangan ke dua, ketiga dan seterusnya.¹⁵

F. Instrument Penelitian

Adapun beberapa metode pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis menggunakan beberapa metode, yaitu:

1. Observasi

Observasi merupakan salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif. Observasi adalah proses pencatatan yang dilakukan secara sistematis. Pada pengamatan ini pengumpulan data dalam kegiatan penelitian yang dilakukan peneliti dengan mengamati kondisi yang berkaitan dengan obyek penelitian.¹⁶

2. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi lansung antara peneliti dengan responden. Komunikasi berlangsung dalam bentuk tanya jawa dalam hubungan tatap muka, sehingga gerak dan mimic responden merupakan pola media yang melengkapi kata-kata secara verbal. Karena itu, wawancara tidak hanya menangkap ide tetapi juga menangkap perasaan, pengalaman, emosi, motif yang dimiliki oleh responden yang bersangkutan. Dalam penelitian ini, penelitian akan melakukan wawancara kepada informan yang telah ditentukan dalam penentuan informan diatas, untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan untuk

¹⁵Sayuti Una, Pedoman Penulisan Skripsi Edisi Revisi (Jambi: Syariah Press Fakultas Syariah IAIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi, cet, Kedua, 2014), h. 18

¹⁶Beni Ahmad Saebani, “Metode Penelitian”, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008), h. 186

mengetahui kinerja Badan Usaha Milik Desa Buntu Terpedo Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara. Data diperoleh dengan peneliti mewawancara Kepala Desa, Ketua BPD, Ketua dan pegawai BUMDes, beserta masyarakat sekitar.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu setiap bahan yang tertulis ataupun film. Dan pengumpulan data dilakukan dengan meniliti catatan-catatan tertulis, seperti dokumen, buku, dan catatan yang berhubungan dengan pelayanan terpadu satu pintu baik dalam media cetak maupun media sosial. Cara ini dilakukan terutama pada studi awal penelitian yang memperjelas masalah yang akan diteliti. Teknik ini penilaian terhadap referensi-referensi yang berhubungan dengan focus permasalahan penitian, dokumen resmi, maupun foto-foto.

G. Pemeriksaan Keabsahan Data

Agar dapat mempertanggung jawabkan data secara benar dan akurat, maka perlu dilakukan pemeriksaan keabsahan data yang telah dikumpulkan. Riki Rinaldi (2022) mengemukakan bahwa pemeriksaan kriteria kredibilitas dengan Teknik pemeriksaan data sebagai berikut:

1. Uji kredibilitas

Untuk dapat mempertanggung jawabkan data yang telah diperoleh secara akurat dan benar, diperlukan pemeriksaan keabsahan data yang telah diperoleh baik dari wawancara berstruktur, observasi dan partisipasi, maupun studi dokumentas. Teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan sebagai berikut:

a. Meningkatkan ketekunan pengamatan

Ketekunan pengamatan dimaksud guna dapat menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari, dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci. Dengan kata lain peneliti mencoba mengamati, lebih teliti, rinci dan berkesinambungan terhadap pola analisis pengelolaan dana badan usaha milik desa. Cara yang peneliti lakukan dalam meningkatkan ketekunan pengamatan adalah sebagai berikut;

- 1) Peneliti langsung melakukan proses penilitian ke lapangan secara cermat dan berkesinambungan.
- 2) Peneliti menguraikan secara rinci hasil penilitian dan menelaahnya untuk di bandingkan dengan referensi buku, dan hasil penelitian maupun dokumentasi-dokumentasi terkait dengan temuan yang diteliti.

b. Triangulasi

Traingulasi diartikan sebagai pengecekan data-data dari berbagai sumber, dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Melalui triangulasi peneliti akan berusaha menghimpun data tidak hanya dari kelompok dan anggotanya, tetapi juga dari pihak lainya yang terikat. Pengumpulan data juga akan dilakukan dengan Teknik yang bervariasi, serta dalam waktu yang berbeda. Cara peneliti lakukan adalah:

- 1) Peneliti membandingkan apa yang disampaikan informan didepan umum, dengan napa yang disampaikan secara pribadi pada waktu wawancara.

- 2) Membandingkan hasil wawancara mendalam antara sumber data utama dengan sumber data pendukung.

H. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penilitian ini adalah analisis dengan menggunakan model kualitatif. Menurut miles and Huberman, terdapat tiga Teknik analisis data kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.¹⁷ Dalam penilitian kualitatif tersebut pengolahan data tidak harus dilakukan setelah data terkumpul, atau analisis data tidak mutlak dilakukan setelah pengolahan data selesai. Analisis data adalah proses penyederhanaan data dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan interpretasikan.

Data yang diperoleh kemudian dianalisa secara Bersamaan dengan proses pengumpulan data, proses analisis yang dilakukan merupakan suatu proses yang cukup Panjang. Analisis data dalam penilitian secara teknis penulis hanya memfokuskan dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data.

1. Analisis sebelum di lapangan

Peneliti kualitatif telah melakukan analisis data sebelum meneliti memasuki lapangan. Analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan atau data sekunder, yang kegunaanya untuk menentukan focus penilitian. Namun demikian focus penilitian masih bersifat sementar, dan berkembang setelah penilitian masuk dan selama di lapangan.

¹⁷Mathew Miles B, Huberman A. Miche, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), h.26

2. Analisi data di lapangan Model Miles dan Huberman

Miles dan Huberman mengemukakan bahawa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara terus menerus samapai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.aktivitas dalam analisis data yaitu sebagai berikut:¹⁸

a. Reduksi data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci, seperti telah dikemukakan, semakin banyak kompleks dan rumit, untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Memproduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokonya, dengan demikian data yang telah diproduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

b. Penyajian data

Dalam penilitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penilitian kualitatif adalah dengan teks uraian yang bersifat naratif, dengan mendisplay data, akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

c. Penarikan kesimpulan

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penilitian* (Kualitatif, Kualitatif dan R&D), (BAAndung Alfabeta April 2016), h. 28

Kesimpulan merupakan hasil akhir sebuah penilitian yang disusun sesuai dengan tujuan penilitian. Kesimpulan yang baik adalah jawaban atas perumusan masalah atau pertanyaan penilitian. Dalam kesimpulan dikekukakan secara singkat dan padat tentang kebenaran dan terbuktiya suatu hipotesis atau sebaliknya.

Penarikan kesimpulan dilakukan secara terus menerus sepanjang proses penilitian berlangsung. Sejak awal memasuki lokasi penilitian dan selama proses pengumpulan data berlangsung, peneliti berusaha untuk menganalisa dan mencari makna dari data yang dikumpulkan, yaitu dengan mencari pola, tema, hubungan dan persamaan dan hal-hal yang sering timbul yang dituangkan dalam kesimpulan yang tentative namun dengan bertambahnya data melalui verifikasi terus menerus akan mempetoleh kesimpulan-kesimpulan yang bersifat *grounded* (dasar).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Desa

Desa Buntu Terpedo merupakan satu diantara Desa yang berada di Kecamatan Sabbang dari waktu ke waktu mengalami perkembangan ekonomi dan jasa yang sangat pesat. Secara geografis Desa Buntu Terpedo berbatasan dengan:

Sebelah utara	: Desa Bakka
Sebelah Selatan	: Desa Terpedo Jaya Kec.Sabbang Kab. Luwu Utara
Sebelah Barat	: Desa Tulak Tallu
Sebelah Timur	: Desa Pengkedekan, Mekar Sari Jaya Kecamatan Baebunta

2. Luas wilayah

Desa Buntu Terpedo adalah 21.5 Km yang bermanfaatannya berupa:

Pemukiman, luas areal	: 264 Ha
Prasarana Umum, luas areal	: 3 Ha
Lahan Perkebunan, luas areal	: 1.055 Ha
Lahan Persawahan, luas areal	: 618 Ha
Hutan Tanaman Rakyat	: 210 Ha ¹⁹

¹⁹ Jamiluddin Jasman , Kepala Desa Buntu Terpedo kec. Sabbang. kab. luwu utara, pada tanggal 25 September 2020, pukul 10:00 WIT

Melihat kompensi pemanfaatan lahan, yang paling besar adalah untuk lahan pertanian dan perkebunan, hal ini menunjukan bahwa Desa Buntu Terpedo memiliki potensi industry pertanian dan perkebunan yang cukup besar. Luas hutan masyarakat yang ada juga masih potensial baik untuk pengembangan industry. Kondisi ini didukung letak Desa Buntu Terpedo yang cukup strategis, yaitu berada di dekat dari Ibu Kota Kecamatan Sabbang serta dilalui oleh jalan propinsi.

Struktur lokasi Desa Buntu Terpedo pada dasarnya terdiri atas dataran rendah dan pegunungan, dimana suhu udara rata-rata berkisar 31 C dengan curah hujan rata-rata 3.010 mm/th.

Desa Buntu Terpedo terdiri dari 5 (lima) Dusun Yaitu:

- a. Dusun Pantonangan Terdiri Dari 4 RT
- b. Dusun Padang Sarre terdiri dari 3 RT
- c. Dusun Durian Kunyit terdiri dari 2 RT
- d. Dusun Tinimpong terdiri dari 2 RT
- e. Dusun Masarang terdiri dari 1RT

3. Desa Buntu Terpedo memiliki beberapa kelembagaan/kelompok diantaranya:

- a. Lembaga/Organisasi Pemuda
- b. Lembaga/Organisasi Perempuan
- c. Lembaga Adat
- d. Kelompok Tani

4. Kondisi Sosial Ekonomi

Kondisi ekonomi masyarakat Desa Buntu Terpedo tergantung dari mata pencarian mayoritas masyarakatnya dari perkebunan dan pertanian. Sebagian masyarakat menjadi pekerja Bangunan, Pedagang dan Buruh Tani , Pekerjaan lainnya. Tingkat pendapatan masyarakat belum seutuhnya mencukupi kebutuhan hidup karena harga barang tidak sebanding dengan penghasilan yang didapat mereka serta masih minimnya bekal keterampilan, upah buruh yang masih kecil serta masih mahalnya barang-barang kebutuhan sembako. Keadaan tersebut tidak hanya terjadi diwilayah Desa Bunru Terpedo namun wilayah lain juga keadaanya sama.

Jumlah penduduk Desa Buntu Terpedo sampai dengan bulan Februari 2022 sebanyak 715 KK atau 2787 jiwa yang terdiri dari :

- a. Penduduk laki-laki sebanyak 1439 jiwa.
- b. Penduduk Perempuan sebanyak 1348 jiwa.
- c. Penduduk yang Bergama Islam sebanyak 2360 jiwa.
- d. Penduduk yang beragama Kristen sebanyak 428 jiwa.²⁰

²⁰ Jamiluddin Jasman , Kepala Desa Buntu Terpedo kec. Sabbang,kab. luwu utara, pada tanggal 25 September 2020, pukul 10:00 WIT

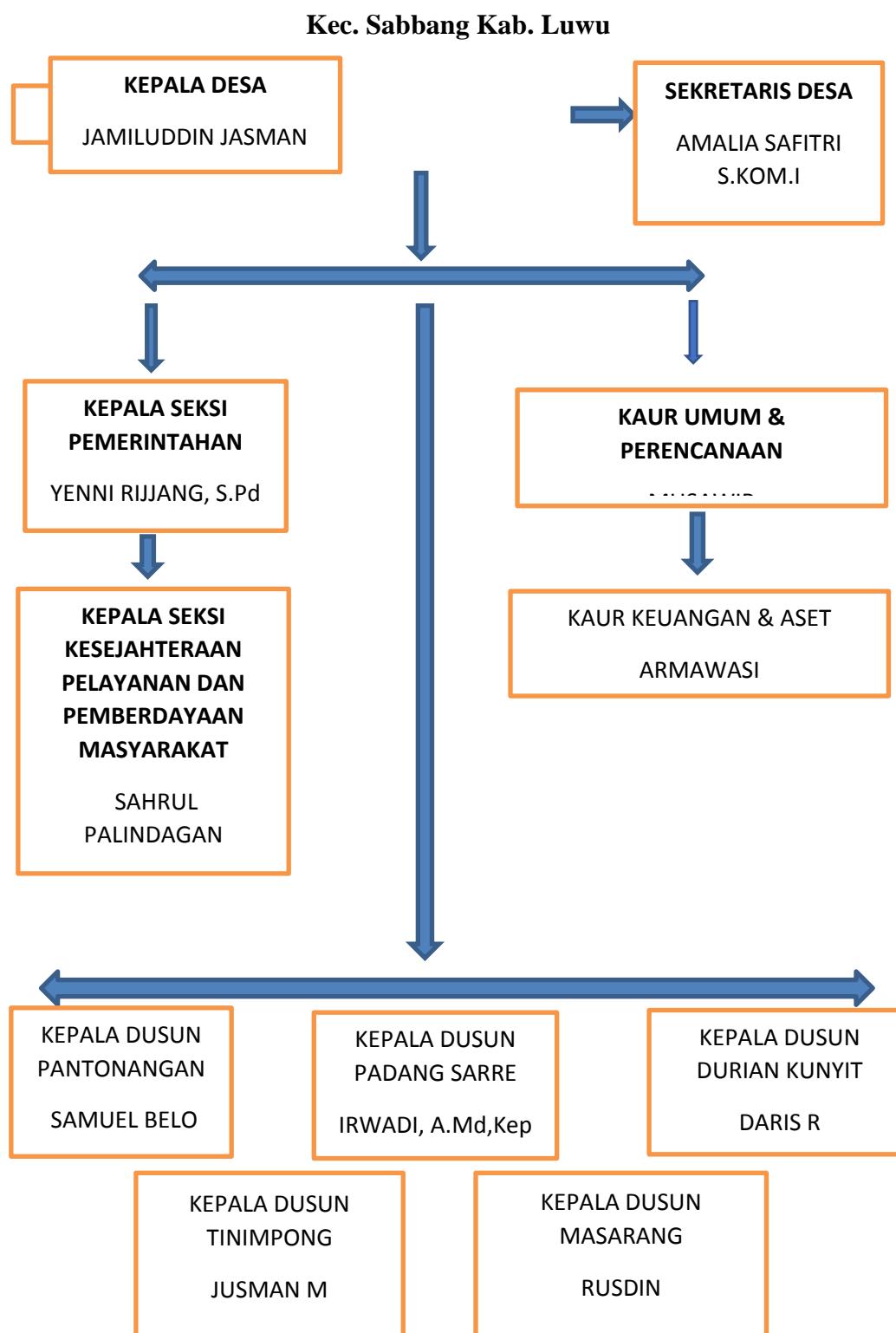
Tabel 4 1 Rekapitulasi Laporan Data Penduduk Desa Buntu Terpedo Bulan Agustus 2022

N o	Dusun	I	P	J umlah Jiwa	R T	L uas wil	K K
1	Pantona ngan	3 45	3 36	6 79	4	6 62	1 70
2	Padang Sarre	4 20	3 83	8 03	2	1 210	1 60
3	Durian Kunyit	3 51	3 31	6 81	2	7 60	1 45
4	Tinimp ong	1 88	1 88	3 75	2	6 75	1 35
5	Masara ng	1 33	1 07	2 40	1	4 93	1 05
Jumlah		1 437	1 343	2 778	1	3 800	7 15. ²¹

²¹ Jamiluddin Jasman , Kepala Desa Buntu Terpedo kec. Sabbang.kab. luwu utara, pada tanggal 25 September 2020, pukul 10:00 WIT

5. Struktur Organisasi

Gambar 4 1 Struktur Organisasi BUMDes Terpedo



B. Usaha yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa Buntu Terpedo Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara.

1. BUMDES *Brokering dan Renting*

Jenis usaha pada BUMDes *Brokering dan Renting* yaitu jasa pembayaran listrik dan penyewaan, yang memiliki tujuan dan sifat yaitu untuk meningkatkan pendapatan desa. Ini merupakan bisnis yang sederhana dan menguntungkan, tidak terkendala faktor pasar, dan memiliki manfaat yaitu ekonomi Desa yang semakin bergairah, pendapatan Desa meningkat serta meningkatkan kinerja pembagunan Desa²².

Berikut wawancara peneliti dengan Kepala Desa Buntu Terpedo Mengenai (BUMDes) tentang usaha yang dikelola Dengan BUMDes, mengatakan bahwa:

“Usaha yang dikelola BUMDes disini adalah badan usaha yang bergerak dibidang usaha simpan pinjam dan ternyata metode tersebut ternyata tidak cocok dengan masyarakat, dengan metode simpan pinjam kami juga berusaha untuk mengambil usaha pupuk subsidi namun mengalami kendala dan insyallah kami akan kembali mencoba membuka usaha yang bergerak di bidang pengelolaan tagihan listrik”²³

2. BUMDes Tranding

²² Herry Kamaroesid, “*Tata Cara Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*”, edisi pertama (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2016), h. 214

²³ Jamiluddin Jasman , Kepala Desa Buntu Terpedo kec. Sabbang.kab. luwu utara, pada tanggal 25 September 2020, pukul 10:00 WIT

Jenis usaha ini yaitu bisnis saprotan dan kebutuhan pokok serta bisnis hasil pertanian yang memiliki tujuan dan sifat yang pertama internal Desa, melayani kebutuhan masyarakat setempat. Kedua eksternal Desa, menjual hasil pertanian keluar dan meningkatkan pendapatan. Dan ketiga bisnis internal Desa, relative sederhana serta berskala kecil-lokal. Tetapi Bisnis eksternal sangat kompleks. Itu juga BUMDes Tanding juga memiliki manfaat yaitu masyarakat Desa mudah memperoleh kebutuhan pokok dan saprotan.²⁴

Berikut wawancara penilitian dengan Anggota BPD mengenai usaha BUMDes Tranding ini, mengatakan bahwa:

“Ya dalam BUMDes tranding ini iyalah suatu usaha yang menyediakan beberapa jenis barang usaha yang diperlukan oleh masyarakat di desa ini seperti penyediaan racun rumput, alat-alat pertanian dan kebutuhan pokok masyarakat seperti (Gas LPG, gula, beras, telur, minyak, sayur-sayuran dan lain-lain). Agar masyarakat lebih mudah mendapatkannya.²⁵

Kemudian wawancara peneliti Bersama ibu Najewang masyarakat Desa Buntu Terpedo mengenai usaha BUMDes:

“Ya memang ada BUMDes yang menyediakan kebutuhan pokok masyarakat seperti itu tapi saya berharap agar bumdes kedepanya bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat desa dan mempermudah segala urusan masyarakat desa sendiri dengan adanya BUMDes ini.²⁶

²⁴

²⁵ Syarifuddin wawancara anggota BPD Desa Buntu Terpedo Kec. Sabbang Kab. Luwu Utara pada tanggal 20 september 2022 pukul 08.00 WIT

²⁶ Najewang wawancara masyarakat Desa Buntu Terpedo kec. Sabbang kab. Luwu utara, pada tanggal 24 September 2022, pukul 13:00 WIT

**C. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Buntu Terpedo
Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara.**

1. Menajemen Strategi

Hakikat pengertian strategi adalah penyesuaian institusi, organisasi dan badan pemerintahan terhadap penyesuaian lingkungan eksternalnya institusi atau organisasi yang tidak dapat menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi pada perubahan lingkungan eksternal akan mengalami kemunduran atau kegagalan. Apabila ditinjau dari perspektif menajemen, maka strategi adalah upaya untuk mengembangkan keuangulan-keungulan atau institusi dalam lingkungan eksternal yang kompetitif untuk pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Rumusan strategi menyinggung masalah bagaimana penggunaan atau pengelolaan sumber daya organisasi dan masalah interaksi organisasi dengan lingkungan eksternalnya. Manajemen strategi adalah seni dan pengetahuan dalam merumuskan, mengimplementasikan, serta mengevaluasi keputusan-keputusan lintas fungsional yang memampukan sebuah organisasi mencapai tujuannya. Tujuan manajemen strategis adalah untuk mengeksplorasi serta menciptakan berbagai peluang baru dan berbeda untuk esok. Perencanaan jangka panjang sebaliknya berusaha untuk mengoptimalkan tren-tren dewasa ini untuk esok. Menerapkan manajemen strategi tentu tidak hanya memikirkan apa yang dibutuhkan saat ini, namun memikirkan apa yang akan terjadi dimasa yang akan datang. Untuk itu dalam menerapkan manajemen strategi menghasilkan startegi

yang berguna menyukseskan tujuan organisasi. Strategi haruslah dibuat oleh penyusun yang ahli dalam bidangnya. Penyusun strategis adalah individu-individu yang paling bertanggung jawab bagi keberhasilan atau kegagalan sebuah organisasi. Penyusunan organisasi membantu organisasi mengumpulkan, menganalisis, serta mengorganisasi informasi. Mereka melacak kecenderungan kecenderungan industri dan kompetitif, mengembangkan model peramalan dan analisis skenario, mengevaluasi kinerja korporat dan individual, mencari peluang-peluang, mengidentifikasi ancaman dan mengembangkan rancangan aksi yang kreatif.²⁷

Agar berjalannya BUMDES dengan baik terdapat prinsip pengelolaan BUMDES yaitu:

- a. Kooperatif Prinsip pengelolaan kooperatif diartikan sebagai sebuah komponen yang terlibat didalam BUMDES harus mampu melakukan kerja sama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya. Komponen yang dimaksud ialah pemerintah Desa, BPD, pemerintah Kabupaten dan masyarakat.²⁸

Berikut wawancara peneliti Berikut wawancara peneliti dengan Kepala Desa tentang prinsip kooperatif, mengatakan bahwa:

²⁷ Ahmad Nur Ihsan, “Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Gerbang Lentera Sebagai Penggerak Desa Wisata Lerep”. Departemen Ilmu Politik dan Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, h. 5-6. 2016.

²⁸ Ahmad Nur Ihsan, “Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Gerbang Lentera Sebagai Penggerak Desa Wisata Lerep”. Departemen Ilmu Politik dan Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, h. 5-6. 2016.

“Semua komponen dalam proses pembentukan BUMDes tersebut akan tetapi ketika dalam perjalanan BUMDes, pihak pengelola seakan acuh dengan BUMDes yang sedang berjalan, kami dari pihak desa sudah berusaha menegur akan tetapi hasilnya tetap sama . dan saya berharap kami memiliki pengelola atau pengurus yang betul-betul ingin dan bisa meluangkan waktunya dan memberikan gagasan-gagasan untuk BUMDes karna saat ini BUMDes kita membutuhkan pengurus yang seperti itu untuk saat ini dan untuk kemajuan BUMDes kita”.²⁹

- b. Partisipatif Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDes.

Berikut wawancara peneliti dengan Daris R Kepala Dusun Durian Kunyit tentang prinsip koperatif, mengatakan bahwa:

“BUMDes di Desa Buntu Terpedo memiliki beberapa komponen yang terlibat di dalamnya yaitu pemerintah desa, pengelola BUMDes, BPD dan masyarakat. Harus mampu saling mendukung dalam setiap aktivitas usaha yang dijalankan oleh BUMDes, dan masyarakat harus mendukung sepenuhnya kegiatan operasional BUMDes dikarenakan tidak melayani metode simpan pinjam atau sebagainya.³⁰

- c. Transparan Aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka. Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, BUMDES harus mau

²⁹ Jamiluddin Jasman , Kepala Desa Buntu Terpedo kec. Sabbang,kab. luwu utara, pada tanggal 25 September 2020, pukul 10:00 WIT

³⁰ Daris R , Kepala Dusun Desa Buntu Terpedo kec. Sabbang,kab. luwu utara, pada tanggal 20 September 2020, pukul 10:00 WIT

memberikan informasi tentang BUMDES dan tidak mempersulit dalam perolehan informasi tersebut, sehingga diperlukan desain sistem pemberian informasi dan aktivitas lain yang memiliki hubungan dengan kepentingan masyarakat umum

Berikut wawancara peneliti dengan Kepala Desa tentang prinsip transparansi, mengatakan bahwa:

“Pihak pengelola BUMDES harus bersifat terbuka mengenai pemasukan, pengeluaran dan apa saja kendala yang dihadapi BUMDES selama ini dalam menjalankan dan memenuhi permintaan masyarakat desa misalnya pembelian aset untuk kegiatan operasional BUMDES seperti mobil, rumah, Dana, dan tanah tempat dimana BUMDES itu ditempatkan.”³¹

Berikut wawancara peneliti dengan Kepala Dusun Tinimpong tentang prinsip transparansi mengatakan bahwa:

“Pihak pengelola BUMDES ini harus seseorang yang benar-benar bisa terbuka terhadap masyarakat agar masyarakat tidak menaruh rasa curiga terhadap pengelolaan dana BUMDES selama ini dan harus selalu melakukan observasi atau sosialisasi terhadap masyarakat Desa baik itu daerah yang mudah dijangkau maupun daerah yang susah dijangkau di Desa Buntu Terpedo ini”³²

d. *Emansipatif* adalah Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDES harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama.

³¹ Jamiluddin Jasman , Kepala Desa Buntu Terpedo kec. Sabbang,kab. luwu utara, pada tanggal 25 September 2020, pukul 10:00 WIT

³² Samuel Belo , Kepala Dusun Tinimpong, Desa Buntu Terpedo kec. Sabbang,kab. luwu utara, pada tanggal 22 September 2020, pukul 15:00 WIT

- e. *Akuntabilitas* Seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggung jawabkan secara teknis maupun administratif. Setiap kegiatan usaha yang dijalankan oleh BUMDES harus bisa dipertanggungjawabkan untuk tetap dapat menjaga prinsip akuntabel. Biasanya dalam bentuk laporan pertanggung jawaban yang disampaikan setiap periode oleh pengelola BUMDES.

Berikut wawancara peneliti dengan kepala Desa Buntu terpedo tentang prinsip Akuntabilitas mengatakan bahwa:

“Setiap satu bulan sekali pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) ini harus dan wajib melakukan laporan atas berjalannya BUMDES ini selama satu bulan penuh dan dia harus dapat mempertanggung jawabkan hasil laporan yang diberikan mulai dari pemasukan, kerugian maupun pengeluran secara jujur dan terbuka”.³³

- f. *Sustainable* Kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDES. Untuk dapat bertahan dalam persaingan usaha, BUMDES harus terus berinovasi dan mempertahankan kualitas usahanya yang dibantu oleh seluruh komponen BUMDES. Hal ini berkaitan dengan perkembangan omzet, perolehan laba/rugi, kondisi barang/jasa, sistem pelayanan, upaya promosi, lokasi dan ekspansi usaha BUMDes.

Berikut wawancara peneliti dengan kepala Dususn Masarang tentang prinsip Akuntabilitas mengatakan bahwa:

“Saya berharap agar pemuda Desa Buntu Terpedo ini dapat memeberikan masukan atau lebih baiknya mereka ikut andil dalam melestarikan atau

³³ Jamiluddin Jasman , Kepala Desa Buntu Terpedo kec. Sabbang.kab. luwu utara, pada tanggal 25 September 2020, pukul 10:00 WIT

menjalankan BUMDES Desa Buntu Terpedo ini agar nantinya BUMDES kita ini tidak berhenti sampai sini saja, saya berharap pemuda berkereasi semenarik mungkin dan memberikan gagasan yang baik untuk BUMDES kedepanya”.³⁴

D. Permasalahan Yang Mengakibatkan Tidak Berjalannya Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)

Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (*social institution*) dan komersial (*comersial institution*). Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial.

Faktor-faktor penghambat tumbuh berkembangnya Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)

1. Keracunan posisi BUMDES sebagai Institusi sosial dan Komersial Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 memberikan keleluarsaan jenis usaha yang akan dikelola BUMDes. Dalam melaksakan fungsinya, BUMDES tidak hanya sebagai institusi komersial semata, tetapi juga sebagai institusi sosial yang tujuan akhirnya dapat berkontribusi dalam mensejaterakan masyarakat. Hanya saja kedua fungsi ini tidak banyak dibahas dalam peraturan pemerintah maupun peraturan Menteri.

³⁴ Rusdin , Kepala Dusun Masarang, Desa Buntu Terpedo kec. Sabbang.kab. luwu utara, pada tanggal 25 September 2020, pukul 10:00 WIT

Hal ini akan menjadi trade off bagi keterlibatan dan partisipasi warga dalam pengelolaan dan manfaat dari usaha yang dipilih BUMDes. Pemerintah perlu untuk memperjelas fungsi BUMDES sebagai institusi sosial dan komersial. Kejelasan aturan terkait dua fungsi tersebut akan menguatkan BUMDes, terutama dalam melakukan kerja sama usaha dengan pihak lain, Selain itu kejelasan tersebut akan dapat menghilangkan kebingungan bagi pengelola BUMDes.

2. Rendahnya inisiatif internal masyarakat dalam menggerakkan ekonomi

Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa sebagai organisasi campuran (hybrid) antara masyarakat berperintahan (*selfgoverning community*) dengan pemerintah lokal (local self goverment). Desa juga tidak identik dengan pemerintah desa dan kepala desa, namun meliputi pemrintah lokal dan sekaligus mengandung masyarakat, yang keseluruhannya membentuk kesatuan hukum.

Kontruksi ini juga membawa perbedaan antara aspek kajian BUMDes dan Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/BUMD) yang merupakan badan usaha yang berperan sebagai alat intervensi pemerintah pada tataran perekonomian nasional atau daerah. Inisiatif dalam mebentuk usaha desa juga seharusnya hadir bersamaan di internal desa (pemerintah desa dan masyarakat) dala musyawarah desa sehingga kehadirannya bisa menggali potensi dan menjawab permasalahan yang dihadapi oleh desa.

Dalam pembentukan BUMDes harus memahami potensi dan kondisi desa yang kemudian atas inisiatif bersama (perangkat desa dan masayarakat) membentuk BUMDes. Penyelenggaraan musyawarah desa dalam pembentukan

BUMDes tidak sebatas memenuhi administratif semata, namun perlu dilihat faktor-faktor produksi yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Tercapainya target pembentukan BUMDes harus diiringi dengan kualitas serta optimalnya usaha yang dijalani.

3. Kebijakan yang belum mengarahkan profesionalisme BUMDes

Masih banyak struktur pengelolaan BUMDes belum seluruhnya menyesuaikan dengan Permendes Nomor 4 Tahun 2015. Hal ini dapat dilihat dengan masih ada pengelolaan BUMDes yang dijabat oleh aparatur Desa. Selain itu tidak diperjelasnya unsur pengawas BUMDes dalam Permendes, terlebih dalam peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Kondisi ini membuat “semu” proses pertanggungjawaban BUMDes. Pasal 31 Permendes tersebut menyatakan bahwa salah satu tugas anggota BPD adalah menjadi pengawas BUMDes yang merupakan bagian/organ dari BUMDes, maka dapat dikatakan anggota BPD itu melakukan pengawasan terhadap dirinya sendiri, meskipun proses pertanggung jawabannya melalui pemerintah desa.

Kejelasan pengawasan diperlukan untuk mengantisipasi potensi moral hazard (penyelewengan/penyalahgunaan) oleh pelaksana BUMDes, kejelasan ini akan mewujudkan pengelolaan BUMDes yang demokratis dan sesuai dengan prinsip kegotongroyongan. Oleh karena itu, sepatutnya direksi BUMDes memperhatikan dan menerapkan standar manajemen yang profesional dan menunjung tinggi prinsip transparansi dan akuntabilitas. Perlu adanya

sinkronisasi kebijakan dalam pengaturan organ BUMDes sehingga akan memperkokoh pengelolaan BUMDes secara umum. Hal ini akan berdampak pada profesionalisme kerja dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

4. Pemahaman Perangkat Desa Mengenai BUMDes masih kurang

Pemahaman perangkat desa terutama kepala desa mengenai BUMDes masih kurang. Ini terjadi karena kepala desa selama ini hanya mengenal tugas sebagai kepanjangan tangan dari struktur pemerintah di atasnya yang lebih banyak berurusan dengan masalah administrasi dan pertanggungjawaban proyek dan program yang datang dari atas. Akibatnya butuh usaha keras untuk memahami BUMDes yang lebih bertumpu pada masalah kewirausahaan. Lemahnya pemahaman mengenai BUMDes itulah yang membuat wacana BUMDes tidak tersosialisasi dengan baik kepada warga desa.

5. Kepemimpinan dan manajerial Pemerintah Desa dan Direksi BUMDes

Pemerintah desa merupakan organ yang bertugas melakukan pengawasan secara umum sesuai dengan anggaran dasar serta memberikan nasehat kepada direksi dan kepala unit usaha dalam melaksanakan pengelolaan BUMDes dan memberikan saran atau 65 pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMDes. Dalam melaksanakan kewajibannya, pemerintah desa mempunyai kewenangan untuk meminta penjelasan dari pengurus mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan BUMDes dan melindungi terhadap hal-hal yang dapat merusak keberlangsungan dan cita BUMDes.

Namun jika BUMDes tidak mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah desa untuk mengembangkan usahanya, maka akan sangat sulit bagi BUMDes tersebut menggerakkan potensi ekonomi lokal bagi peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat.

6. Konsep pembangunan Desa yang keliru

Konsep pembangunan desa yang selama ini dipahami masih sebatas pemahaman pembangunan fisik dan atas arahan struktur dari atas. Selain itu pembangunan fisik lebih gampang terlihat sebagai prestasi karena ada entuk fisik yang terlihat. Berbeda dengan proyek pemberdayaan yang lebih bersifat program yang tidak hasilnya tidak terlihat secara fisik, lemahnya pembangunan SDM inilah yang membuat kapasitas kelembagaan dan kewirusahaan desa tidak berkembang.

Dari penjelasan diatas dan hasil penelitian dari peneliti dapat disimpulkan bahwa terjadinya kesalahan dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Teluk Pandan Rambahan disebabkan karena kurangnya kepedulian masyarakat untuk membantu dalam proses kemajuan BUMDes dan kurangnya sosialisasi dari pihak pengelola, pemerintah desa kepada masyarakat, tidak adanya kebijakan pemerintah desa ketika BUMDes mulai tidak menunjukkan kemajuan serta kurangnya profesional pengelola dalam pengaturan manajerial operasional BUMDes.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat ditinjau dari beberapa faktor diantaranya :

a. Segi Ekonomi

Aktivitas dan pemerhati perekonomian desa percaya sistem ekonomi solidaritas lebih efektif membangun desa dibanding ekonomi kerakyatan. Pasalnya, ekonomi kerakyatan selama ini hanya menunggu kebijakan pusat. Sedangkan ekonomi solidaritas adalah sebuah konsep yang mengajak masyarakat desa untuk bersama-sama membangun ekonomi desa dengan modal dan potensi alam yang ada. Hal tersebut sesuai dengan pola hidup pedesaan Indonesia. Ekonomi solidaritas dibentuk dan dibangun oleh dan bersama-sama masyarakat desa melayani dirinya sendiri

b. Segi Agama,Sosial dan Budaya

Badan usaha Milik Desa (BUMDes) diharapkan dapat menstimulus dan menggerakkan roda perekonomian dipedesaan. Lembaga ini harapan sepenuhnya dikelola oleh masyarakat sehingga dapat meningkatkan standar hidup ekonomi masyarakat pedesaan. Namun demikian budaya dan adat istiadat yang berkembang ditengah masyarakat saat ini merupakan perilaku dan kebiasaan yang terbentuk dari tuntunan agama yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya.

BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial maupun komersial. Sebagai lembaga sosial BUMDes berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan lembaga komersial, BUMDes bertujuan untuk mencari keuntungan melalui penawaran barang dan jasa ke pasar selain

diharapkan menjadi induk pengelola sekaligus owner segala aktifitas ekonomi di desa, Keberadaan BUMDes pada tingkat desa merupakan posisi yang sangat strategis karena dinilai dapat berperan aktif sebagai motor penggerak perekonomian desa.

Adapun nilai pengelolaan merupakan kegotong royongan yang mana hasil usahanya dialokasikan untuk pengembangan usaha, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Pendekatan sistem ekonomi berbasis keadilan dan aturan Allah SWT menawarkan beberapa konsep terutama dalam membantu mengatasi permasalahan yang mungkin timbul terkait BUMDes.

Pertama, keberadaan BUMDes sebagai lembaga usaha dipedesaan yang masih tergolong baru dan belum memiliki dasar hukum yang memayungi keberadaan BUMDes, walupun sebenarnya secara tersirat dalam undang-undang, akan tetapi belum ada Peraturan Daerah yang mengatur tentang tata cara pembentukan dan pengelolaan.

Kedua, kinerja BUMDes dalam pengembangan usaha yang kurang optimal disebabkan kurangnya pembinaan serta rendahnya tingkat pendidikan pengurus BUMDes. Keberadaan pengurus yang kompeten mempunyai peran yang sangat penting dan strategi dalam upaya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BUMDes. Pengetahuan soft skill terkait teori dan aplikasi sistem ekonomi islam bisa segera ditawarkan. Ajaran Nabi berupa konsep kerja yang shiddiq (perkataan dan perbuatan yang benar), amanah, fatonah (pandai menangkap peluang) dan tabligh (menyampaikan) menjadi kunci suksesnya pola bisnis di tengah masyarakat.

Ketiga kurangnya kinerja kelembagaan BUMDes dalam pengembangan usaha yang dilakukan oleh BUMDes lebih disebabkan kepada kurangnya akses permodalan bagi BUMDes.³⁵

Berikut wawancara dengan asist sebagai masyarakat Desa Buntu Terpedo sebagai berikut :

“Saya sadar bahwa Desa Kita ini saya rasa tertinggal dikarenakan kurang optimal, kurangnya pembinaan dan praserana pendukung untuk membantu keberadaan pengurus BUMDes untuk mengelola dan kurangnya pemahaman masyarakat Desa tentang usaha apa yang dikelola oleh BUMDes kita ini.”³⁶

Dari penjelasan diatas serta hasil peneliti dari beberapa informan masyarakat Desa Buntu Terpedo Kec. Sabbang Kab. Luwu Utara dapat disimpulkan bahwa dari segi ekonomi belum memadai karena masyarakat belum mampu untuk membeli barang yang sediakan BUMDes, karena masyarakat lebih memilih barang yang ada di toko kelontong, sedangkan dari segi sosial mayarakat belum banyak mengetahui BUMDes karena pihak pengelola dan pemerintah desa kurang mempromisikan dan latar pendidikan yang rendah, serta dari budaya pihak pengelola tetap mematuhi peraturan adat dan budaya yang ada di desa.

Ditinjau dari dari segi ekonomi islam yang bertujuan untuk terciptanya kesejahteraan masyarakat, karena tujuan ekonomi islam sebagai berikut :

- 1) Kesejahteraan ekonomi dalam rangka norma moral Islam.

³⁵ M.Republika.co.id. “sistem ekonomi islam dalam penguatan Badan Usaha Milik desa” di akses pada 21 Juli 2022 pukul 17:05 WIB

³⁶ Asist Mulki , masyarakat Desa Buntu Terpedo kec. Sabbang.kab. luwu utara, pada tanggal 25 Juli 2020, pukul 19:00 WIT

- 2) Membentuk masyarakat dengan tatanan sosial yang solid berdasarkan sistem ekonomi syariah dan persaudaraan yang universal.
- 3) Mencapai distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil dan merata.
- 4) Menciptakan kesejahteraan individu dalam konteks kesejahteraan sosial.³⁷

Sistem ekonomi Islam pada dasarnya telah berkembang dan tumbuh dalam kehidupan masyarakat pedesaan. Perkembangan dan pertumbuhan tersebut berada diantara dua sistem ekonomi, yaitu ekonomi kapitalis dari perkotaan yang dominan, dan pra kapitalis yang merupakan bagian tradisional masa lalu pedesaan. Ekonomi Islam adalah sebuah sistem ekonomi yang berdasar pada syariat Islam sebagai norma dan nilai-nilai kehidupan. Ekonomi Islam diyakini mampu memakmurkan dan mensejahterakan semua pihak, baik non muslim maupun muslim sendiri.

Peluang pengembangan ekonomi Islam melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terbuka lebar. Hal pertama yang mendasari terbuka lebarnya peluang pengembangan ekonomi Islam melalui BUMDes adalah masyarakat pedesaan Indonesia yang mayoritas adalah pemeluk agama Islam. Kedua, masyarakat telah banyak belajar dari para ahli ekonomi dan ulama seperti Majelis Ulama Indonesia dan lain lain, sehingga pemahaman masyarakat akan pentingnya mengikuti ajaran agama Islam dalam kehidupan ekonomi akan semakin kuat. Ketiga, adanya regulasi yang kuat dari pemerintah terkait penerapan sistem ekonomi Islam pada institusi keuangan, dan panduan dalam penggunaan akad yang mendukung

³⁷Yuli widyaastuti, "Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terhadap kejahteraan masyarakat Pujokerto Kecamatan Trimurjo Kabupaten Tengah Perspektif Ekonomi Islam" Skripsi 2017, h. 114

pertumbuhan ekonomi Islam. Keempat, persebaran lembaga keuangan syariah yang semakin luas hingga ke daerah dan pedesaan di Indonesia, yang mempermudah masyarakat untuk mengakses dan mengaplikasikan transaksi dan akad dalam ekonomi Islam. Kelima, kerasnya arus pergulatan dunia ekonomi kapitalis dan liberal yang menggerus kekayaan dan harta masyarakat. Hal inilah yang ditawarkan oleh sistem ekonomi Islam yang membantu mensejahterakan masyarakat dan mengeluarkan masyarakat dari jeratan kapitalisme dan liberalisme.

Selanjutnya, penerapan sistem ekonomi Islam pada Badan Usaha Milik Desa memiliki dua bentuk pola. Pertama adalah melalui 72 penerapan akad-akad ekonomi Islam pada Badan Usaha Milik Desa yang mencakup enam sektor usaha. Keenam sektor tersebut adalah penyediaan jasa (serving), lembaga keuangan mikro (banking), persewaan barang (renting), penyaluran penjualan bahan mentah (brokering), penyediaan kebutuhan sehari-hari (trading), serta induk usaha-usaha desa (holding).

Pola penerapan yang kedua adalah melalui implementasi sistem manajemen Islami pada Badan Usaha Milik Desa tersebut. Nilai manajemen syariah tersebut diterapkan dalam manajemen perencanaan yang mencakup perencanaan sumber daya manusia, perencanaan keuangan, pemasaran, dan perencanaan operasional. Selain itu konsep manajemen syariah juga diterapkan pada pengambilan keputusan, pengorganisasian, pengarahan (actuating), serta penerapan dalam pengawasan.

Sebagai salah satu bagian dari ilmu sosial, ekonomi Islam adalah suatu ilmu yang mempelajari dan mengkaji berbagai usaha manusia dengan berlandaskan nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar Islam, yaitu merujuk kepada Al-Qur'an dan Hadits. Upaya dan usaha manusia tersebut dimaksudkan dalam mengelola dan mengalokasikan sumber daya untuk mencapai kesejahteraan dan kemuliaan (falah). Kemudian falah digambarkan sebagai kehidupan yang penuh dengan kesejahteraan secara umum. Kesejahteraan tersebut bersifat material maupun spiritual, dan menciptakan keadilan sosial dan kemakmuran.

Falah yang merupakan tujuan dan dasar pada praktik kehidupan ekonomi Islam berlangsung pada konteks dunia dan akhirat. Dalam kehidupan dunia, falah mencakup aspek kelangsungan hidup, kebebasan dalam berkeinginan, kehormatan serta kekuatan. Sementara itu dalam aspek kehidupan akhirat mencakup kelangsungan hidup yang abadi, kesejahteraan yang abadi, serta kemuliaan yang abadi. Ekonomi Islam memiliki konsep dasar yang berbeda dari ekonomi sosialisme dan kapitalisme. Selain didasarkan pada konsep spiritual, ekonomi dalam Islam juga didasarkan pada konsep ukhuwah atau persaudaraan dan keadilan secara universal terhadap sesama manusia. Nilai persaudaraan dan keadilan menuntut manusia agar sumber daya yang diupayakan didistribusikan secara merata dan adil kepada seluruh umat manusia melalui kebijakan yang adil. Dalam hal ini didapatkan instrument seperti zakat, infak, shadaqah, pajak, dan lain sebagainya.

Nilai-nilai ekonomi Islam yang didasari pada Al-Qur'an dan Hadits adalah nilai-nilai yang bersifat universal. Jika kita saksikan, disaat ekonomi kapitalis,

sosialis dan liberalis terfokus pada hukum sebab dan akibat dalam suatu kegiatan ekonomi, maka ekonomi Islam lebih fokus untuk membahas etika dan nilai-nilai yang terkandung dalam setiap kehidupan ekonomi. Titik terang ekonomi Islam yang mampu menyadarkan masyarakat adalah pelarangan riba dan bunga pada tahun 1980 hingga 1990-an. Hingga pada saat ulama bersepakat untuk menumbuhkan proyek ekonomi Islam melalui pendirian perbankan syariah di Indonesia. Pertumbuhan dan perkembangan institusi keuangan yang berbasis ekonomi Islam pun merambah cepat hingga keseluruh daerah nusantara. Dalam ekonomi islam terdapat beberapa akad yang dibagi menjadi beberapa jenis :

- a) Titipan atau simpanan yaitu wadi'ah Akad wadi'ah dimaknai sebagai titipan dari satu pihak kepada pihak lainnya. Penitipan tersebut dapat berupa penitipan secara individu atau pun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan apabila penitip menghendaki. Pihak yang dititipi boleh mengenakan biaya administrasi penitipan.
- b) Bagi Hasil yang terdiri dari Musyarakah, Mudharabah, Muzara'ah, dan Musaqah Musyarakah adalah adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam suatu usaha tertentu. Kerjasama tersebut dapat berbentuk kontribusi dana dengan kesepakatan resiko dan keuntungan ditanggung bersama. Sementara itu Mudharabah adalah akad kerjasama antara shahibul maal (pemilik modal) dan mudharib (pengelola modal). Kerjasama tersebut menghasilkan keuntungan dan pendapatan dari pengelolaan modal oleh mudharib. Pembagian hasil apabila mendapat keuntungan berdasarkan bagian yang disepakati di awal. Namun bila terjadi kerugian dengan catatan bukan

dikarenakan kelalaian mudharib, maka kerugian ditanggung oleh shahibul maal. Akad Muzara'ah adalah bentuk kerjasama pengelolaan lahan pertanian diantara pemilik tanah dengan mereka yang menggarap tanah tersebut. Pemilik lahan menyerahkan tanahnya untuk ditanami dan dipelihara kepada petani atau penggarap tanah tersebut, dengan diberikan imbalan dari pembagian yang disepakati. Sementara itu Musaqah adalah bentuk sederhana dari Muzara'ah, dimana penggarap tanah atau pekerja hanya sebagai penyiram dan pemeliharaan tanah tersebut. Imbalannya berupa hasil pertanian dengan persentase tertentu yang telah disepakati.

- c) Jual Beli yaitu Murabahah, Ba'i Salam, dan Istishna' Akad Murabahah adalah akad dalam transaksi pembiayaan yang dilakukan oleh shahibul maal (pemilik modal) berupa penyalangan dana kepada seorang nasabah dalam rangka pemenuhan kebutuhan barang/jasa. Nasabah tersebut diwajibkan untuk mengembalikan dana talangan tersebut seutuhnya dengan margin keuntungan diantara selisih harga pembelian dari penjual dengan harga jual kepada nasabah. Namun kewajiban pemilik modal adalah memberitahukan harga asli dari produk yang dibeli dan menjelaskan keuntungan yang didapat oleh pemilik modal. Ba'i salam adalah akad yang berupa pembiayaan talangan dana yang dibutuhkan oleh nasabah dalam rangka pembelian barang atau jasa yang membutuhkan pembayaran di awal sebelum barang atau jasa tersebut selesai dikerjakan dan diserahkan langsung kepada nasabah. Nasabah juga berkewajiban untuk mengembalikan dana talangan tersebut ditambah dengan margin yang dapat diangsur sesuai dengan kesepakatan. Sementara itu

Istishna' adalah akad kontrak penjualan antar penjual dan pembeli barang. Pembeli barang memesan terlebih dahulu dan menjelaskan secara spesifik bagaimana bentuk barang yang diinginkan. Sistem pembayaran dapat disepakati diawal, baik berupa angsuran, pembayaran di awal atau langsung dilunasi.

- d) Sewa yaitu Ijarah Ijarah adalah sewa menyewa dengan akad pembiayaan berupa penyalangan dana dari pihak shahibul maal kepada nasabah untuk memiliki suatu barang atau jasa dengan cara menyewa barang tersebut dalam jangka waktu yang disepakati.
- e) Jasa terdiri dari Wakalah, Kafalah, Hawalah, Rahn, dan Qardh Wakalah adalah transaksi akad dengan cara pemberian kekuasaan kepada shahibul maal untuk melakukan tindakan dengan mengatasnamakan nasabah terhadap transaksi dengan pihak ketiga. Sementara itu kafalah adalah akad jaminan yang dipergunakan oleh penanggung kepada pihak ketiga dalam rangka memenuhi kebutuhan pihak kedua atau yang ditanggung. Hawalah adalah akad pengalihan hutang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang menanggungnya. Rahn adalah gadai atau semacam jaminan dari hutang dalam transaksi perekonomian secara umum. Dan Qardh adalah akad pembiayaan berupa bantuan kepada masyarakat dhuafa yang memiliki keinginan untuk berwirausaha. Yang diberikan bantuan tersebut hanya diwajibkan mengembalikan pinjaman pokok saja.

Sejauh ini, dari beberapa bentuk usaha dari Badan Usaha Milik Desa Teluk Pandan Rambahan (BUMDes) tersebut belum ditemukan oleh peneliti yang

menerapkan nilai-nilai dan akad-akad ekonomi Islam. Padahal dalam peraturannya, pemerintah tidak mengatur secara spesifik dan khusus tentang pendirian, pengelolaan, serta usaha yang boleh dilakukan oleh BUMDes. Artinya, pemerintah telah memberikan otonomi kepada perangkat daerah dan desa terkait pengelolaan BUMDes yang dikehendaki. Maka, akan sangat memungkinkan pengelolaan BUMDes dengan menerapkan akad-akad dan prinsip ekonomi Islam.

Terlebih kehidupan kapitalis ekonomi konvensional telah mandarah daging di kehidupan masyarakat. Dalam ekonomi kapitalis masyarakat dapat terpengaruh dengan tujuan awal dari ekonomi tersebut, yaitu mencari keuntungan sebesar-besarnya tanpa memperhatikan kerugian yang terjadi pada orang lain dan ditambah lagi dengan masyarakat yang belum mengerti dengan sistem ekonomi islam sebagai faktor besar yang mengakibatkan dalam penerapan tersebut tidak berjalan, sebenarnya dalam tatanan kehidupan ekonomi islam telah ada akan tetapi sistem ekonomi konvensional lebih mendominasi sehingga banyak masyarakat hanya mengejar keuntungan semata.³⁸

³⁸ Ahmad Maslahatul Furqan, Salahuddin, Rizqi Anfanni Fahmi, “Peluang Pengembangan Ekonomi Islam Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)”. Working Paper Keuangan Publik Islam No. 6 Seri 1 Tahun 2018, h. 4-7

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penilitian maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa pengelolaan Dana Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Buntu Terpedo Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara. Yaitu

1. Usaha yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Buntu Terpedo Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara .pada awalnya melakukan usaha metode simpan pinjam namun tidak sesuai dengan keiginan penegelola BUMDes dan Pemerintah Desa dan mereka akan mencoba membuka usaha yang bergerak di bidang penyewaan alat-alat pertanian, kebutuhan pokok masyarakat (gas LPG, gula, beras, telur, minyak, sayur, dan lainnya). Usaha yang dilaksanakan BUMDes tersebut adalah jenis usaha BUMDes brokering dan renting serta BUMDes tranding. BUMDes sebenarnya sangat bermanfaat dalam perkembangan perekonomian desa dan sebagai tempat lapangan pekerjaan bagi masyarakat Desa.
2. Agar BUMDes berjalan dengan baik terdapat beberapa prinsip pengelolaan yaitu kooperatif, partsipatif, emansipatif, transparan.dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Buntu Terpedo Kec. Sabbang Kab. Luwu Utara belum sepenuhnya melaksanakan prinsip pengelolaan tersebut terutama dari pihak pengelola yang seolah acuh akan tugas dan tanggung jawab yang di berikan.

B. Saran

Dengan adanya kesimpulan yang sudah dikemukakan di atas penulis menyarankan ada beberapa hal dalam meningkatkan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Buntu Terpedo Kec. Sabbang Kab.Luwu Utara:

1. Kepala Pemerintah Desa Buntu Terpedo Kec. Sabban Kab. Luwu Utara agar lebih memperhatikan penegelolaan Dana Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) agar BUMDes tersebut dapat berjalan dengan baik serta dapat membantu dan menunjang perekonomian masyarakat.
2. Kepala pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) agar dapat lebih memaksimalkan kinerja secara profesional serta memperhatikan standar operasional pendirian Badan Usaha Milik Desa dan memaksimalkan potensi sumber daya manusia yang berkualitas.
3. Kepada masyarakat Desa Buntu Terpedo Kec. Sabbang Kab. Luwu Utara agar dapat membantu dan mendukung dalam semua kegiatan operasional Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) agar tercapainya Visi dan Misi BUMDes.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshori Mujahid, Skripsi *“Efektivitas Pengelolaan Bumdes Aik Mateng Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Aik Bual Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah”* Universitas Islam Negeri Mataram Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam (2019)
- Belo Samuel, Kepala Dusun Tinimpong, Desa Buntu Terpedo kec. Sabbang.kab. luwu utara, pada tanggal 22 September 2020, pukul 15:00 WIT
- Daris R , Kepala Dusun Desa Buntu Terpedo kec. Sabbang.kab. luwu utara, pada tanggal 20 September 2020, pukul 10:00 WIT
- Firmansyah Adi, Skripsi *“Efektivitas Dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa(Bumdes) Di Kec.Tanete Riaja Kab. Barru”* Universitas Muhammadiyah Makassar Jurusan Akuntansi (2018)
- Fadli Muhammad Rijal, *“Memahami desain metode penelitian kualitatif”* (Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia) (Jurnal Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum Vol. 21. No. 1. (2021)), h.38
- Furqan Ahmad Maslahatul, Salahuddin, Rizqi Anfanni Fahmi, “Peluang Pengembangan Ekonomi Islam Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)”. Working Paper Keuangan Publik Islam No. 6 Seri 1 Tahun 2018, h. 4-7
- ID Tesis, “Teori Lengkap tentang Efektivitas Program menurut Para Ahli dan Contoh Tesis Efektivitas Program”, *Artikel* di akses dari <https://idtesis.com/teori-lengkap-tentang-efektivitas-program-menurut-para-ahli-dan-contoh-tesis-efektivitas-program/> pada tanggal 26 Oktober 2022 pukul 08.00
- Ihsan Ahmad Nur, “Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Gerbang Lentera Sebagai Penggerak Desa Wisata Lerep”.

Departemen Ilmu Politik dan Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro. Hal 5-6. 2016.

Jasman Jamiluddin, Kepala Desa Buntu Terpedo kec. Sabbang. kab. luwu utara, pada tanggal 25 September 2020, pukul 10:00 WIT

Kamaroesid Herry, “*Tata Cara Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*”, edisi pertama (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2016), h. 214

Lestari Ferdiana Ayu, Skripsi “*Efektifitas Pengelolaan Permodalan Usaha Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam*” Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Jurusan: Ekonomi Syariah (2019)

M. Republika.co.id. “sistem ekonomi islam dalam penguatan Badan Usaha Milik desa” di akses pada 21 Juli 2022 pukul 17:05 WIB

Mulki Asist, masyarakat Desa Buntu Terpedo kec. Sabbang.kab. luwu utara, pada tanggal 25 Juli 2020, pukul 19:00 WIT

Nursetiawan Irfan, “*Strategi Pengembangan Desa Mandiri Melalui Inovasi BUMDes, Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintah Dosen Program Studi Ilmu Pemerintah*”, Volume 4. No 2 (2018) 78-79. <http://Jurnal.uniginal.ac.id/index.php>

Nuraeni Dzini, Skripsi “*Efektivitas Program Bumdes Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus Bumdes Unggul Bahtera Desa Babakan, Kec. Karanglewas, Kab. Banyumas)*” Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto Jurusan Ekonomi Syariah (2021)

Najewang, wawancara masyarakat Desa Buntu Terpedo kec. Sabbang kab. Luwu utara, pada tanggal 24 September 2022, pukul 13:00 WIT

Rivai Veithzal, Andi Buchari, Islamic Economics, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 91

- Rusdin , Kepala Dusun Masarang, Desa Buntu Terpedo kec. Sabbang.kab. luwu utara, pada tanggal 25 September 2020, pukul 10:00 WIT
- Rustiarini Ni Wayan, “Good Governance dalam Pengelolaan Dana Desa” (Universitas Mahasaraswati Denpasar) (Jurnal Simposium Nasional Akuntansi, 2016), h. 3
- Sidik, “*Mengali Potensi Lokal Mewujudkan Kemandirian Desa, Sekolah Tinggi Pembagunan Masyarakat Desa (APBD)*”, Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik Volume 19, No. 2. (Mei, 2015) 116.
<http://doi.org/10.22146/jkap.7962>
- Sagita Garniers Lellyana, “*Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Bersdasarkan UU NO 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Study Kasus di BUMDes Tirta Mandiri Klaten)*”, Publikasi Ilmiah, Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017
- Swandari et al., *Life: The science of biology* “Analisis Faktor-Faktor Penentu Kinerja Karyawan BUMDes di Kabupaten Jembrana,” E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana 6.4 (2017): 1366-1370.
- S. Margono, Metodologi Penilitian Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), h.25
- Saebani Beni Ahmad, “Metode Penilitian”, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008), h. 186
- Sugiyono, *Metode Penilitian* (Kualitatif, Kualitatif dan R&D), (Bandung: Alfabeta April 2016), h. 28
- Syarifuddin, Wawancara anggota BPD Desa Buntu Terpedo Kec. Sabbang Kab. Luwu Utara pada tanggal 20 september 2022 pukul 08.00 WIT
- Triyanto. “ *Analisis Kinerja Pendamping Desa Dalam Upaya Membangun Kemandirian Desa*” Jurnal Penilitian Sosial Dan Politik. Volume 7 No. 2. (Desember 31, 2018): 56, <http://journals.unihaz.ac.id>

Una Sayuti, Pedoman Penulisan Skripsi Edisi Revisi (Jambi: Syariah Press Fakultas Syariah IAIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi, cet, Kedua, 2014), h. 18

Wdyaaastuti Yuli, “Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terhadap kejahteraan masyarakat Pujokerto Kecamatan Trimurjo Kabupaten Tengah Perspektif Ekonomi Islam” Skripsi 2017, h. 114

L

A

M

P

I

R

A

N

Lampiran 1 Daftar Informan

DAFTAR INFORMAN

O	Nama	Umur	Jenis Kelamin	Pekerjaan	Alamat	Pendidikan
	Jamiludin Jasman	35	L	Kepala Desa buntu Terpedo	Dusun Padang Sarre	SMA
I	Amalia Safitri, S. Kom.	28	P	Sekretaris Desa	Dusun Padang Sarre	S1
	Alpin Saputra S.Pd	28	L	Masyarakaat	Dusun Padang Sarre	S1
	Armawasi	35	P	Kaur Keuangan	Dusun Durian Kunyi	SMA
	Sahrul palindangan	28	L	Kepala Seksi Kesejahteraan	Dusun Pantonangan	SMP
	Samuel Belo	34	L	Kepala Dusun Pantonangan	Dusun Pantonangan	SMA
	Yenni Rijjang S. Pd	30	P	Kepala Seksi Pemerintah	Dusun Padang Sarre	S1

	Syarifulddin	40	L	Anggota BPD	Dusun Durian Kunyi	S1
	Musawir	28	L	Kaur Umum Perencanaan	Dusun Durian Kunyi	SMA
0	Jusman M	30	L	Kepala Dusun Tinimpong	Dusun Tinimpong	SMP
1	Irwadi, A.Md.Kep	28	L	Kepala Dusun Padang Sarre	Dusun Padang Sarre	S1
2	Rusdin	28	L	Kepala Dusun Masarang	Dusun Masarang	SMA
3	Daris R	30	L	Kepala Dusun Durian Kunyi	Dusun Durian Kunyi	SMP
4	Asist Mulki	22	L	Masyarakat	Dusun Durian Kunyi	SMA
5	Najewang	35	P	Masyarakat	Dusun Durian Kunyi	SMP

o	Jenis Kelamin	Jumlah	Umur
	Perempuan	4	25-50
	Laki-Laki	11	22-50

o	Nama Dusun	Jumlah Informan	Umur
1	Dusun Padang Sarre	5	25-50
2	Dusun Durian Kunyi	6	22-50
3	Dusun Pantonangan	2	25-50
	Dusun Masarang	1	25-50

4			
5	Dusun Tinimpong	1	25-50

o	Pendidikan Terakhir	Jumlah Informan	Umur
1	SMP	4	25-50
2	SMA	7	22-50
3	S1	4	25-50

Lampiran 2 Pedoman Wawancara Perangkat Desa dan BUMDEs

PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Riki Rinaldi

NIM : 18 0402 0165

Jurusan/Semester : Perbankan Syariah/VIII (Delapan)

Daftar Pertanyaan Wawancara Perangkat Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa :

1. Bagaimana sejarah awal berdirinya Desa Buntu Terpedo Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara ?

2. Bagaimana sejarah didirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Buntu Terpedo Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara ?

3. Apa tujuan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ?

4. Apa saja usaha yang dikelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ?

5. Berapa jumlah alokasi dana desa yang diberikan untuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

6. Apa kendala yang menyebabkan BUMDes tidak berjalan dengan semestinya ?

7. Apakah peran pemerintah desa dalam kegiatan operasional Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)?

8. Berapa jumlah sumber daya manusia yang mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ?

9. Apakah dampak positif dan dampak negatif Ketika BUMDes masih berdiri dan sudah di tutup. ?

10. Apakah dalam waktu yang dekat akan didirikan Kembali Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ?

PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Riki Rinaldi

NIM : 18 0402 0165

Jurusan/Semester : Perbankan Syariah/VIII (Delapan)

Wawancara Untuk Masyarakat

1. Apakah BUMDes di Desa Buntu Terpedo Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara Bermanfaat ?

2. Apa saja usaha yang dikelola oleh BUMDes?

3. Apakah BUMDes berdampak positif dan negatif terhadap masyarakat Desa ?

4. Apakah BUMDes melibatkan masyarakat dalam kegiatan operasional ?

5. Bagaiman strategi dari pihak BUMDes dalam mempromosikan barangnya ke masyarakat ?

6. Bagaimana peran masyarakat desa untuk memajukan BUMDes di desa ?

7. Apakah BUMDes berdampak buruk ke warung kelontong ?

8. Bagaimana perbandingan harga di BUMDes dan Warung Kelontong ?

9. Apakah selama kerja di BUMDes mendapatkan peningkatan pendapatan Ekonomi ?

10. Apakah harapan untuk desa pada umumnya dan untuk BUMDes pada khususnya ?

DOKUMENTASI PENELITIAN



Wawancara dengan bapak Jamiluddin Jasman selaku kepala Desa Buntu Terpedo Kec. Sabbang. Kab. Luwu Utara



Wawancara dengan bapak syarifuddin selaku Anggota BPD Desa Buntu Terpedo Kec. Sabbang Kab. Luwu Utara



Wawancara dengan bapak Daris R selaku kepala Dusun Durian Kunyit Desa Buntu Terpedo Kec. Sabbang Kab. Luwu Utara



Wawancara dengan bapak Jusman M selaku kepala Dusun Tinimpong Desa Buntu Terpedo Kec. Sabbang Kab. Luwu Utara

Lampiran 5 Surat Ijin Penilitian



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)**

Jalan Simpurusiang Kantor Gabungan Dinas No.27 Telp/Fax 0473-21536 Kode Pos 92961 Masamba

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 20098/01614/SKP/DPMPTSP/VII/2022

Membaca : Permohonan Surat Keterangan Penelitian an. Riki Rinaldi beserta lampirannya.
Memimpang : Rekomendasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Utara Nomor 070/282/VI/Bakesbangpol/2022
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
6. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan, Non Perizinan dan Penanaman Modal Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Memberikan Surat Keterangan Penelitian Kepada :
Nama : Riki Rinaldi
Nomor : 082148667900
Telepon :
Alamat : Dsn Durian Kunyi, Desa Buntu Terpedo Kecamatan Sabbang, Kab. Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan
Sekolah / : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo
Instansi :
Judul : Analisis Pengciakan Dana Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Desa Buntu Terpedo Kec. Sabbang Kab. Luwu
Penelitian Utara
Lokasi : Buntu Terpedo, Desa Buntu Terpedo Kecamatan Sabbang, Kab. Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan
Penelitian

Dengan ketentuan sebagai berikut

1. Surat Keterangan Penelitian ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juli s/d 30 Agustus 2022 (3 Bulan).
2. Mematuhi semua peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
3. Surat Keterangan Penelitian ini dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila pemegang surat ini tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat Keterangan Penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan batal dengan sendirinya jika bertentangan dengan tujuan dan/atau ketentuan berlaku.

Diterbitkan di : Masamba
Pada Tanggal : 07 Juli 2022

KEPALA DINAS
AHMAD JANISTI
NIP. 196604151998031007

Retribusi : Rp. 0,00

No. Seri : 20098



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Bitti Kota Palopo 91914 Telepon 085243175771
Email: febi@iainpalopo.ac.id; Website: <https://febi.iainpalopo.ac.id/>

Nomor : B422/ln.19/FEBI.04/KS.02/06/2022
Lamp : 1 (satu) Exampler
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Palopo, 30 Juni 2022

Yth. Kepala DPMPTSP Kabupaten Luwu Utara

Di -
Masamba

Bersama ini disampaikan bahwa mahasiswa :

Nama	:	Riki Rinaldi
Tempat/Tanggal Lahir	:	Buntu Terpedo, 14 Oktober 1999
NIM	:	18 0402 0165
Fakultas	:	Ekonomi dan Bisnis Islam
Prodi	:	Perbankan Syariah
Semester	:	VIII (Delapan)
Tahun Akademik	:	2021/2022
Alamat	:	Desa Buntu Terpedo Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara

akan melaksanakan penelitian di Masyarakat Kecamatan Sabbang, dalam rangka penulisan skripsi dengan Judul **“Analisis Pengelolaan Dana Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Buntu Terpedo Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara.”**

Demikian surat permohonan ini disampaikan, atas bantuanmu diucapkan terima kasih.



RIWAYAT HIDUP



Riki Rinaldi, lahir di Dusun Durian Kunyit pada tanggal 14 Oktober 1999. Penulis merupakan anak ketiga dari empat bersaudara dari pasangan seorang Ayah Nasir H. dan Ibu Najewang. Penulis berasal dari Desa Buntu Terpedo, Kec. Sabbang, Kab. Luwu Utara, Provinsi Sulawesi selatan. Pendidikan dasar penulis selesai pada tahun 2011 di SDN 013 Padang Sarre, Kec. Sabbang. Kemudian di tahun yang sama penulis menempuh pendidikan di SMPN 4 Sabbang hingga tahun 2015. Pada tahun 2015 penulis melanjutkan pendidikan di SMAN 5 Luwu Utara hingga tahun 2017. Setelah lulus SMA di tahun 2017, penulis melanjutkan pendidikan S1 di program studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo.

Contact Person Penulis: rikirinaldi0165_mhs18@iainpalopo.ac.id